RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan Dokumen tahunan yang wajib disusun pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/ kota. Penyusunan Dokumen ini mengacu kepada Peratuaran Menteri Dalam Negeri tahun 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana embangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. .Dalam Dokumen ini tertuang visi misi kepala daerah serta prioritas-prioritas yang setiap tahunnya berubah untuk menyesuaikan isu strategis yang akan ditangani namun masih berada pada koridor target-target yang telah ditetapkan didalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah disusun untuk periode 2017 – 2022.

RKPD 2021 Kabupaten Barito Kuala bertemakan Pemulihan Ekonomi Dan Pemerataan Pelayanan. Didalamnya tergambar Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui program kegiatan yang telah dipetakan dari Permendagri 13 tahun tentang pedoman. Pengelolaan Keuangan Daerah ke nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Selain dari Visi Misi Bupati Dan Wakil Bupati, program kegiatan ini juga berasal dari usulan masyarakat yang di inventarisir melalui musrenbang desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten Barito Kuala. Evaluasi pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan dan pendapatan daerah digambarkan pada kebijakan daerah , sekaligus di sinkronkan dengan prioritas pembangunan propinsi Kalimantan selatan serta prioritas nasional dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2022.

Diharapkan dengan disusun dan disampaikannya dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 ini dapat menjadi acuan atau referensi dari seluruh stakeholder Dalam bersinergi membangun daerah. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat dalam upaya membangun daerah dan mensejahterkan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI, AS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3

1.3. Hubungan Antar Dokumen 7

1.4. Maksud dan Tujuan 7

1.5. Sistematika Dokumen RKPD 8

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 12

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 12

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 12

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 20

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 22

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 31

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2020 50

2.2.1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja 52

2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja 54

2.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja 58

2.2.4. Fakto-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan 58

2.2.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah 120

2.2.6. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut. 122

2.3. Permasalahan Pembangunan 123

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 123

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 125

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 131

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 131

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 132

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 132

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 132

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 137

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 137

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional (RPJMN 2020 – 2024) 137

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan (2016 – 2020) 140

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala (RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022) 141

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 142

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 157

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 160

VII. PENUTUP 191

LAMPIRAN - LAMPIRAN 193

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan	12
Tabel 2.2	Pengeluaran per kapita dan Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 - 2020	27
Tabel 2.3	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2017-2020	33
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2020	35
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Presen), 2017-2020	37
Tabel 2.6	Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2020	39
Tabel 2.7	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	40
Tabel 2.8	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020	46
Tabel 2.9	Data Blankspot di Kabupaten Barito Kuala	47
Tabel 2.10	Data Dermaga Pelabuhan dan Dermaga Penyebrangan di Kabupaten Barito Kuala	51
Tabel 2.11	Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian dibawah Target	53
Tabel 2.12	Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian sesuai Target	55
Tabel 2.13	Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian sesuai Target	59
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020	59
Tabel 2.15	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020	90
Tabel 2.16	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020	91
Tabel 2.17	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020	91
Tabel 2.18	Target SPM Kabupaten Barito Kuala Bidang Kesehatan Tahun 2020	94
Tabel 2.19	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020	96
Tabel 2.20	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020	97
Tabel 2.21	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	100
Tabel 2.22	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	100
Tabel 2.23	23 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	101
Tabel 2.24	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	102
Tabel 2.25	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	103
Tabel 2.26	Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020	105
Tabel 2.27	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020	106

Tabel 2.28	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020	107
Tabel 2.29	Target SPM Bidang Sosial Tahun 2020	109
Tabel 2.30	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020	110
Tabel 2.31	Komposisi Belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020	111
Tabel 2.32	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020	111
Tabel 2.33	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2020	113
Tabel 2.34	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020	116
Tabel 2.35	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	118
Tabel 2.36	Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2020	120
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	128
Tabel 2.38	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai	129
Tabel 3.1	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023	135
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	136
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiyanaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022	137
Tabel 4.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022	146
Tabel 4.2	Prioritas, Sasaran Prioritas, Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	148
Tabel 6.1	Indikator dan target kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala	14
Gambar 2.2	Hamparan sawah di Balai Benih Induk Padi Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala	15
Gambar 2.3	Jeruk Siam, salah satu komoditas unggulan pada *one village one product* (OVOP) Kabupaten Barito Kuala	16
Gambar 2.4	Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2020	18
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut kelompok umur dan jenis kelamin	19
Gambar 2.6	Persentase penduduk Kabupaten Barito Kuala berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu	19
Gambar 2.7	Perkembangan IPM Kab. Barito Kuala	20
Gambar 2.8	Perkembangan Usia Harapan Hidup	21
Gambar 2.9	Perkembangan Harapan Lama Sekolah	22
Gambar 2.10	Rata-rata Pengeluaran per Kapita	22
Gambar 2.11	Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala	24
Gambar 2.12	Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Barito Kuala	26
Gambar 2.13	Perkembangan Tingkat Kemiskinan	27
Gambar 2.14	Perkembangan Angka Kematian Ibu	28
Gambar 2.15	Perkembangan Angka Kematian Bayi	29
Gambar 2.16	Perkembangan angka pengangguran Kab. Barito Kuala	29
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah	41
Gambar 2.18	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	42
Gambar 2.19	Perkembangan Angka Harapan Hidup	43
Gambar 2.20	Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala	44

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.

Kedudukan RKPD Tahun 2022 berada pada tahun kelima perencanaan jangka menengah untuk mencapai "**Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)".** Sehingga RKPD Tahun 2022 mempunyai arti penting dalam Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Namun secara yuridis formal, perencanaan tahun 2022 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 sebagai acuan yang memiliki dasar hukum tetap, dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tergambar pada alat ukur keberhasilan pembangunan yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan target kinerja masing-masing indikator selama 5 tahun mendatang.

Pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, telah mempedomani kebijakan strategis nasional, serta memperhatikan fenomena, permasalahan dan isu-isu strategis terjadi baik pada tingkat nasional maupun regional. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya:

a. Pemulihan ekonomi dan sosial kemasyarakat sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Kalimantan Selatan pada umumnya serta Barito Kuala pada khususnya sejak awal tahun 2020 yang lalu;
b. Penyediaan pangan yang berasal dari produksi domestik, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, penganekaragaman pangan yang bergizi, dan distribusi serta keamanan pangan;
c. Tingkat pendapatan masyarakat, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
d. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang belum optimal;
e. Tingkat cakupan pelayanan infrastruktur dasar khususnya di perdesaaan dan peningkatan kualitas infrastruktur strategis di wilayah strategis baik yang berada di ruas jalan TAMAN SARI BUNGA maupun ruas jalan KUTA BAMARA dan infrastruktur lainnya dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala;
f. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Batola Bersih dan Nyaman dengan pengendalian dan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
g. Kualitas demokrasi dan akuntabilitas pelayanan pemerintah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan daerah dan aset milik daerah;
h. Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang menjadi potensi dan keunggulan Barito Kuala;
i. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Barito Kuala.

Pelayanan publik dan pemulihan ekonomi menjadi isu penting pada RKPD Tahun 2022, mengingat hal ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah pada berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, perizinan dan pelayanan pemerintahan lainnya. Dengan memperhatikan isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada

RKPD Tahun 2022 mengusung tema "**Pemulihan Ekonomi dan Pemerataan Pelayanan**" yang akan dicapai dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2022 masing-masing dengan sasaran prioritas.

Dalam rangka mewujudkan tema tersebut dan untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan serta guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan baik prioritas pembangunan nasional dengan Kabupaten Barito Kuala maupun prioritas pembangunan Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Kuala.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah produk hukum daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Peraturan Bupati Barito Kuala. Agar memiliki legalitas yang memadai, maka ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau rujukan sebagai landasan hukumnya, yakni :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembar Negara Republik Indonesia 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6573);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
u. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
v. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
w. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
x. Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
y. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
z. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
aa. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatab Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifiksasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

jj. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;

mm.. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;

nn. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD).

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2022. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah:

a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta stakeholder lainnya;
e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian ringkas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022, kedudukan RKPD tahun rencana dalam RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan Dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daearah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

1.3. Hubungan Aantar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika penysunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Sampai Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2020 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menyajikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala terkait dengan pembangunan bidang Sumber Daya Manusia, Ekonomi, Sarana dan Prasarana, Lingkungan Hidup dan Pemerintahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah dan Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2022 baik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Barito Kuala, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2022.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2022 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, indikator dan target kinerja pembangunan daerah tahun 2017-2022 sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Menjelaskan keterkaitan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2017-2022 pada Tahun berkenaan, serta SDGs (*Sustainable Development Goals*).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan secara rinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2022. dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatornya.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan tentang indikator dan target kinerja penyelenggaraan pembangunan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 untuk tahun berkenaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada 2^0 29' 50' – 3^0. 30' 18' Lintang Selatan dan 114^0 20' 50' – 114^0 50' 18" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Nagara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa. Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Laut Jawa
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 Km^2 dan terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan.

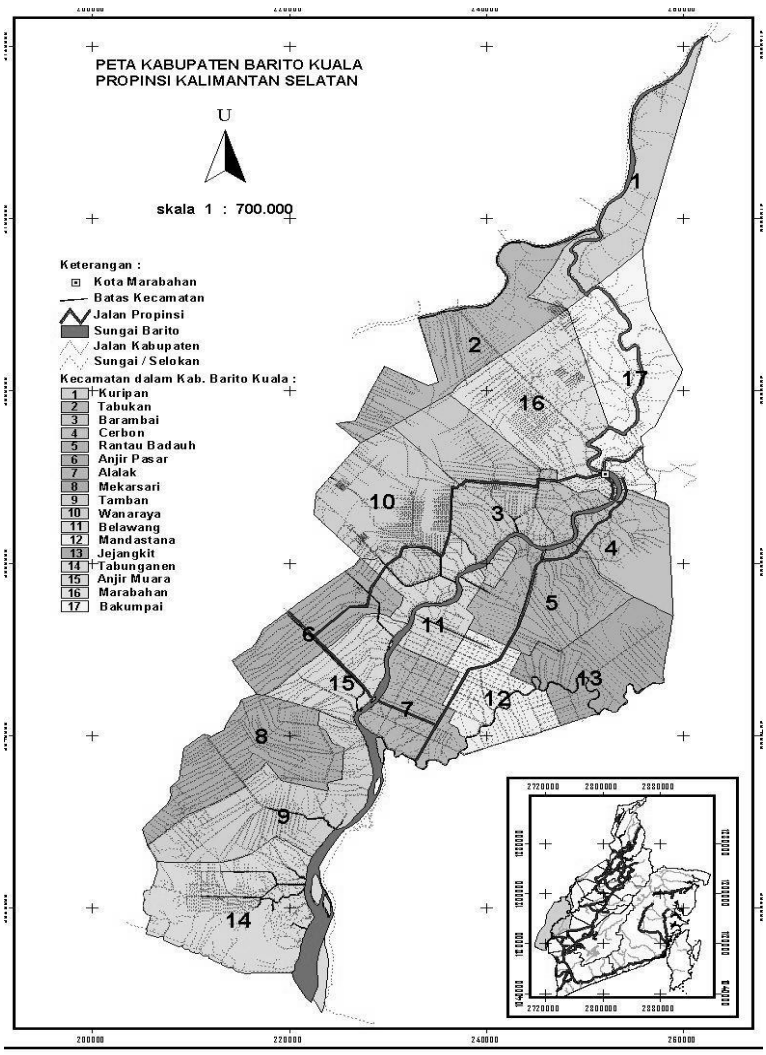
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tabunganen	14	249,00	8,01
2.	Tamban	16	164,30	5,48

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km)	Persentase
3.	Mekarsari	9	143,50	4,79
4.	Anjir Muara	15	117,25	3,91
5.	Anjir Pasar	15	126,00	4,20
6.	Alalak	18	106,85	3,57
7.	Rantau Badauh	9	206,00	6,87
8.	Barambai	11	261,81	8,74
9.	Belawang	13	80,25	2,68
10.	Wanaraya	13	37,50	1,25
11.	Cerbon	8	183,00	6,11
12.	Bakumpai	9	261,00	8,71
13.	Marabahan	10	221,00	7,37
14.	Mandastana	14	136,00	4,54
15.	Tabukan	11	166,00	5,54
16.	Kuripan	9	343,50	11,46
17.	Jejangkit	7	303,00	6,77
Jumlah		**201**	**2.996,96**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km^2 atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km^2 atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala terletak pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang serta didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Nagara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan.

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Berdasarkan sektor ini, jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan pertanian dan lahan non pertanian. Untuk menjamin keberlangsungan produksi pertanian ini, kabupaten barito kuala telah menginisiasi peraturan daerah tentang pembangunan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala, telah disusun naskah akademik untuk kebutuhan pembuatan perda tersebut. Namun hingga tahun 2021, proses penetapan Perda ini belum selesai dan hingga saat ini masih terkendala pada penetapan deliniasi spasial yang merupakan salah satu lampiran wajib dalam Perda LP2B. Selain melalui dana APBD, usaha untuk menetapkan Perda LP2B ini juga di fasilitasi melalui dana APBN dengan kegiatan berupa Penyusunan Rekomendasi Perlindungan LP2B.



Gambar 2.2 Hamparan sawah di Balai Benih Induk Padi Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 2.3. Jeruk Siam, salah satu komoditas unggulan pada *one village one product* (OVOP) Kabupaten Barito Kuala.

Selain pada sektor tanaman pangan, produksi hortikultura atau produksi perkebunan Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keunggulan yang kompetitif di propinsi Kalimantan Selatan. Jeruk Siam dan Nenas adalah dua komoditas buah-buahan dimana Barito Kuala memberikan sumbangsih yang besar pada total produksi buah tersebut di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2020, Luas tanam untuk Jeruk yang tesebar di seluruh kecamatan adalah sebesar 7.497, 98 Ha dengan luas panen sebesar 5.616 Ha dengan total produksi hampir 100.000 ton atau tepatnya 95.953 ton. Sedangkan untuk komoditas Nenas, yang luas totalnya mencapai 445,39 Ha pada tahun 2020, produksi total mencapai 12.546 Ton. Berbeda dengan jeruk, komoditas nenas tidak di terdapat di seluruh kecamatan dan 91 % dari luas total tersebut berada pada Kecamatan Mekarsari.

Selain kedua jenis buah tersebut, terdapat komoditas lain yaitu kueni yang menjadi salah satu product one village one product (OVOP) Kabupaten Barito Kuala. Perkebunan

komoditas kueni berada di seluruh Kecamatan kecuali kecamatan kuripan dan Jejangkit. Produksi Total pada tahun 2020 mencapai 36.267 Ton dengan luas tanam 417,46 Hektare.

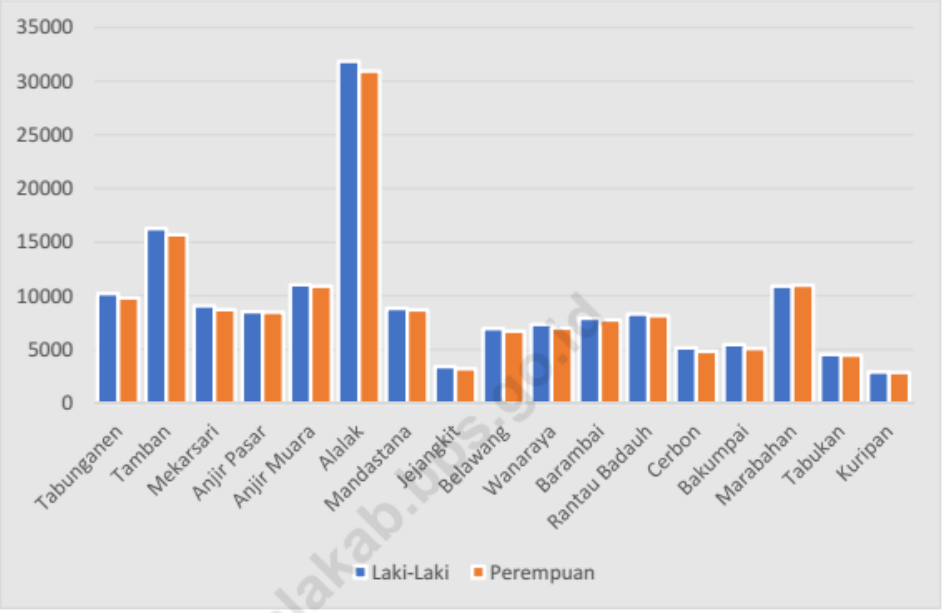


Gambar 2.4. Hamparan kebun nanas di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak. Penduduk Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah beragama Islam selebihnya beragama Hindu, Protestan dan Katolik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala melalui Publikasi Barito Kuala dalam Angka tahun 2021, tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 adalah 313.021 Jiwa. Populasi terbanyak berada di Kecamatan Alalak (62.833 jiwa) dan paling sedikit berada pada Kecamatan Kuripan (5.789 jiwa). Dibandingkan Kabupaten atau Kota lain di lingkup provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala merupakan kabupaten dengan jumlah terpadat ke-6 di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana urutan pertama adalah

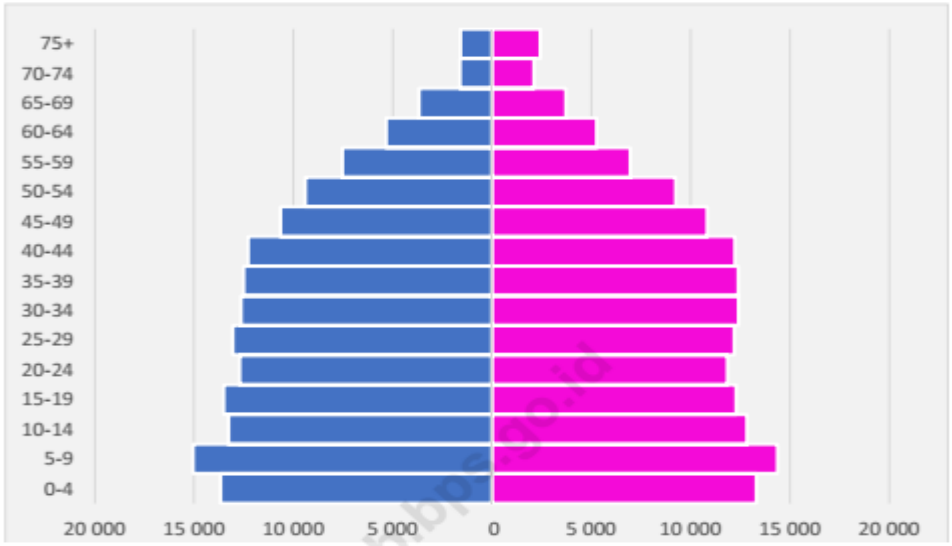
Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk 708.606 Jiwa dan yang terendah yaitu Kabupaten Balangan dengan jumlah penduduk 131.428 Jiwa pada tahun 2019.

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut ini.



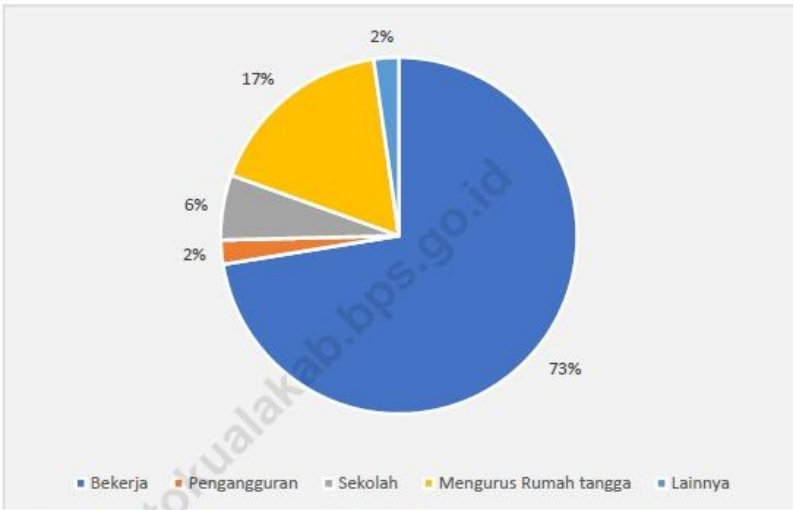
Gambar 2.4 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Barito Kuala pada tahun 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa perbandingan jenis kelamin antar penduduk tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berdasarkan data tahun 2020 yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik Barito Kuala, komposisi penduduk terbanyak adalah berasal dari kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah 31.084 jiwa, di ikuti kelompok umur 0 – 4 Tahun sebanyak 28.693 jiwa. Jumlah penduduk pada usia kerja adalah sebanyak 226.823 Jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 169.540 jiwa yang terdiri dari jumlah angkatan kerja sebanyak 165.277 dan 4.263 Jiwa pada pengangguran terbuka. Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin serta persentase penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik-grafik berikut ini.



Sumber/*Source* : BPS, Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Hasil Registrasi/ /BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census and Registration Result

Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala menurut kelompok umur dan jenis kelamin

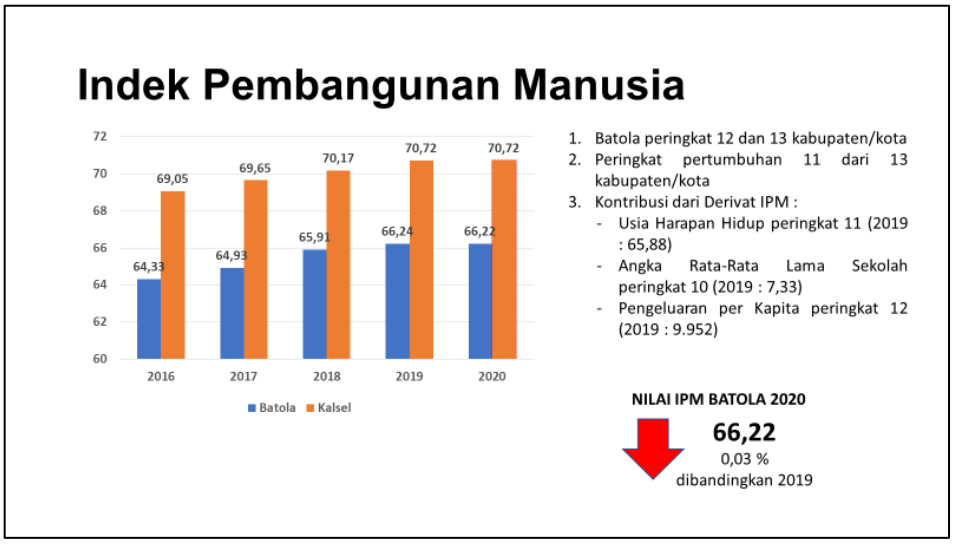


Sumber/*Source* : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus/August National Labor Force Survey

Gambar 2.6. Persentase penduduk Kabupaten Barito Kuala berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

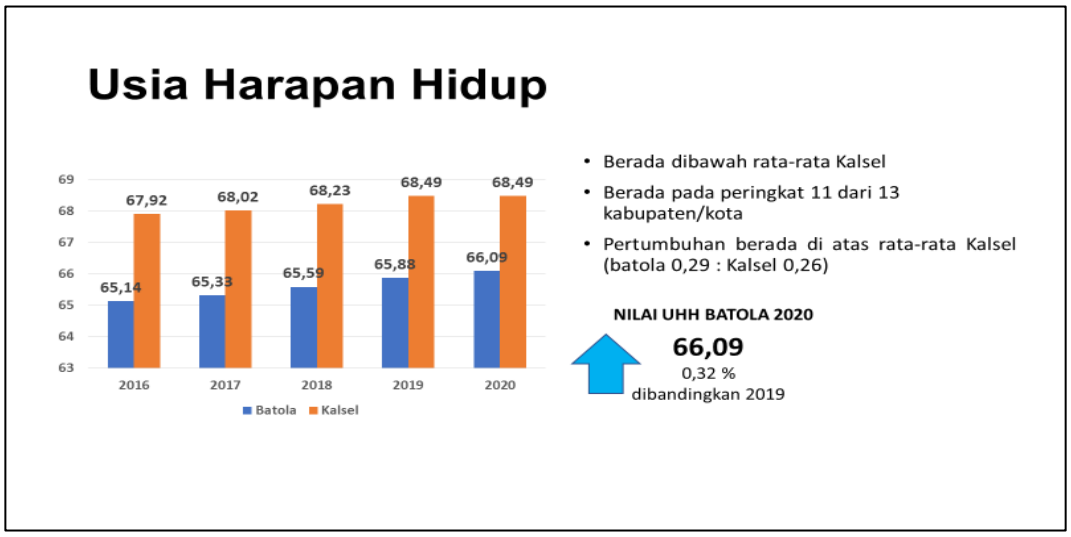
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 2.7. Perkembangan IPM Kab. Barito Kuala

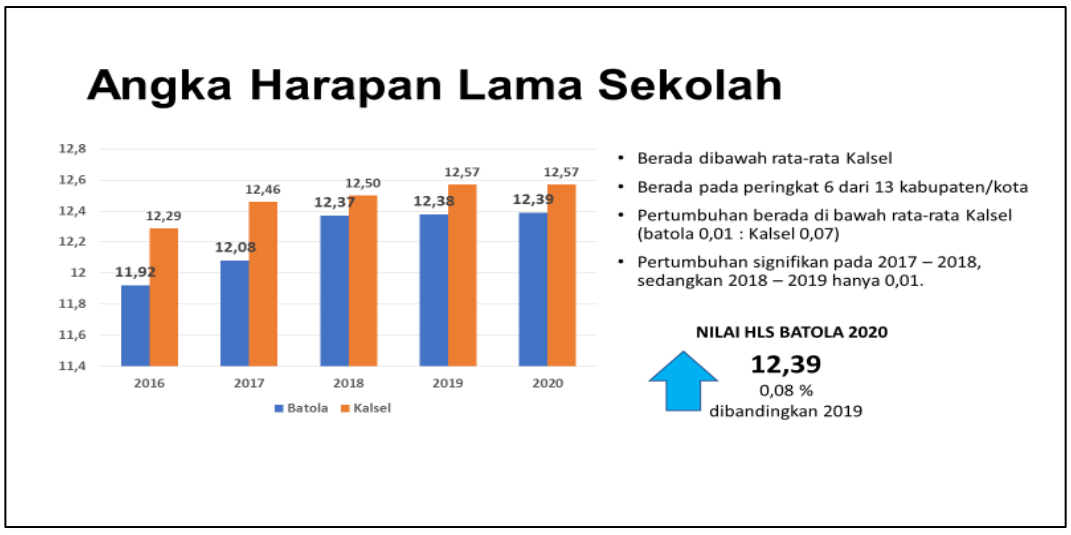
Dari 3 (tiga) dimensi yang membentuk capaian IPM, hanya dimensi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan selebihnya 2 (dua) indikator lainnya yakni Usia Harapan Hidup (UHH) dan Rata-Rata Lama Sekoleh mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan capaian Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah

dan Rata-rata Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Barito Kuala sebagai *derivat* dari Indeks Pembangunan Manusia.



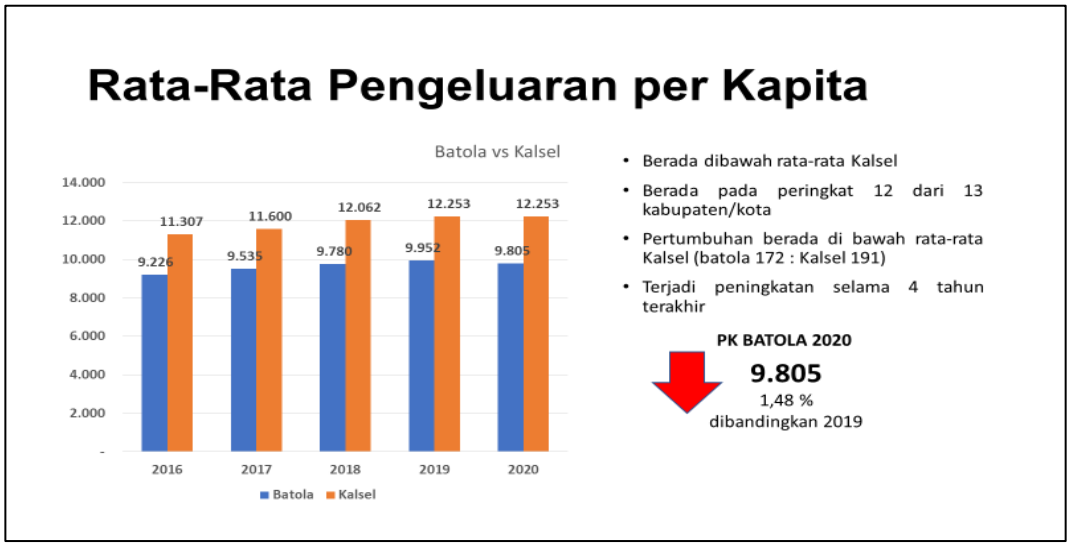
Gambar 2.8. Perkembangan Usia Harapan Hidup

Meskipun capaian Usia Harapan Hidup Barito Kuala masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Selatan, namun progres capaian jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen dan berada pada urutan ke 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.



Gambar 2.9. Perkembangan Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah barito Kuala berada pada peringkat ke 6 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan mengalami peningkatan 0,08 persen dibandingkan dengan tahun 2019, namun demikian masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Selatan.



Gambar 2.10. Rata-rata Pengeluaran per Kapita

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa dari 3 (tiga) *derivat* IPM, pengeluaran per kapita mengalami penurunan pada tahun 2020, berbagai faktor diduga menjadi penyebab dari penurunan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala, salah satunya adalah kondisi Pandemi Covid-19 yang sangat dominan memberikan pengaruh cukup besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

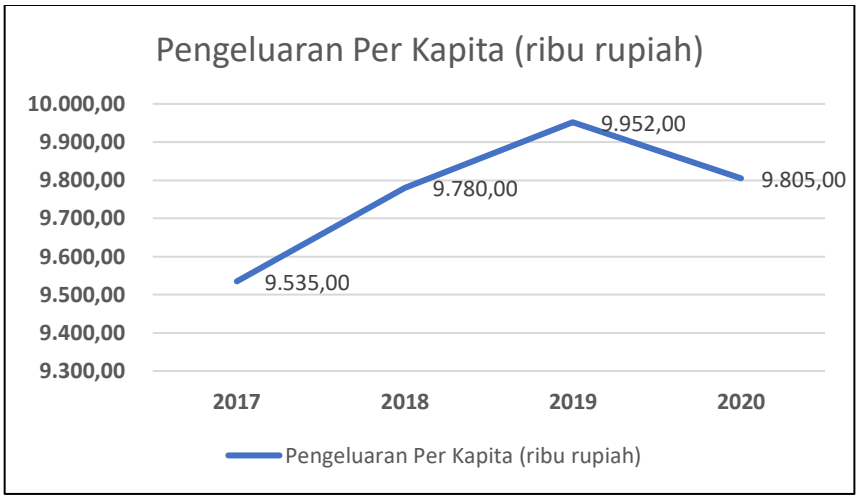
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan dengan pendapatan/penghasilannya. Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat, yang ditinjau dari sisi pendapatan dan

pengeluaran konsumsi/pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan makanan dan non makanan.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan.

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk (PPP) Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah Rp. 9.805,000. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebesar Rp. 147.000 per jiwa/tahun dan berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2020, semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat mengalami penurunan dan penurunan yang tertinggi adalah Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 307.000 per jiwa/tahun, serta yang terendah adalah Kabupaten Banjar sebesar Rp. 78.000 per jiwa/tahun. Berikut adalah perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2020.



Gambar 2.11. Perkembangan pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala

Trend peningkatan terjadi pada periode tahun 2017 sampai dengan 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat.

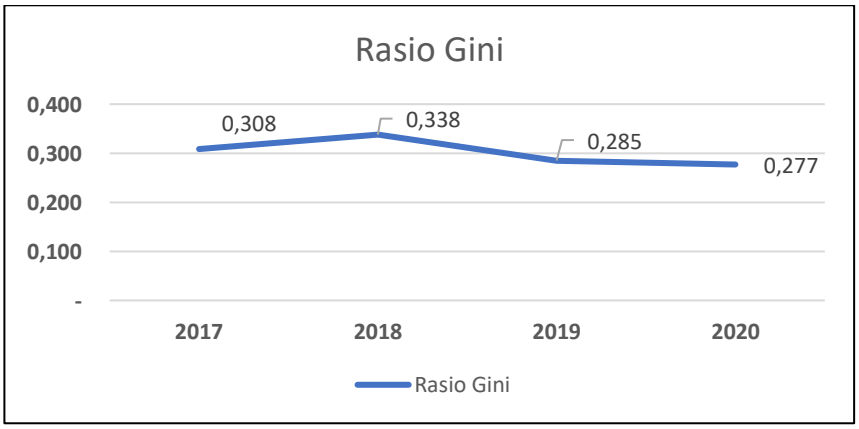
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan

rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
b. Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang.
c. Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Rasio Gini yang dapat memberikan informasi tentang tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang terjadi di suatu wilayah. Nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Apabila rasio gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Berikut perkembangan rasio gini di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2020.



Gambar 2.12. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Barito Kuala

Gini Ratio pada 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 berkategori ketimpangan rendah. Hal ini sejalan dengan kriteria Bank Dunia, Ketimpangan pendapatan sedang karena persentase pendapatan kelompok 40% penduduk terendah tetapi jumlah pendapatan yang diterima lebih dari 17%, yaitu mencapai 23 %.

Tabel 2.2. Pengeluaran per kapita dan Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 - 2020

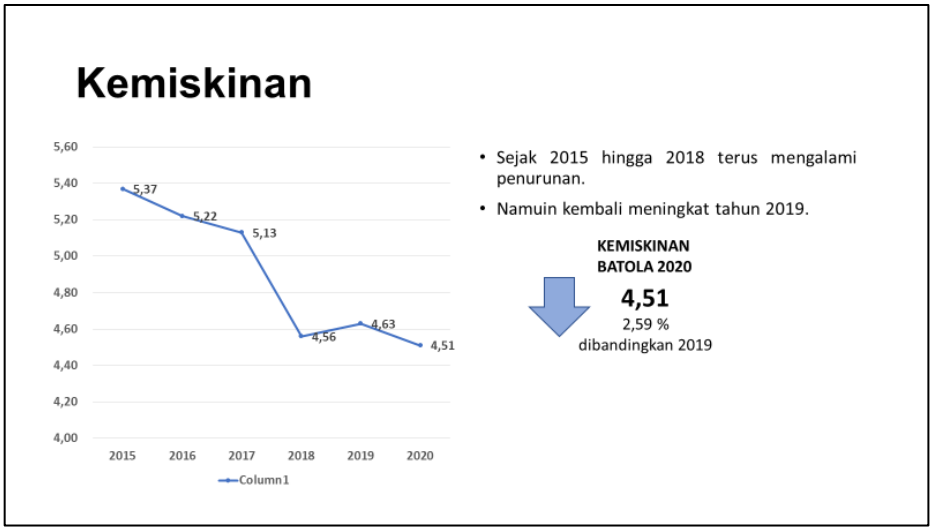
Tahun	Pengeluaran Per Kapita	Indeks Gini
2016	9.226	0,31
2017	9.535	0,31
2018	9.780	0,34
2019	9.952	0,28
2020	9.805	0,27

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat perkembangan pengeluaran per kapita dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun antara tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada pada posisi negatif (-) pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan indeks Gini tahun 2018 menggambarkan tingkat kesenjangan tertinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Indeks kesenjangan terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 0,27.

2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

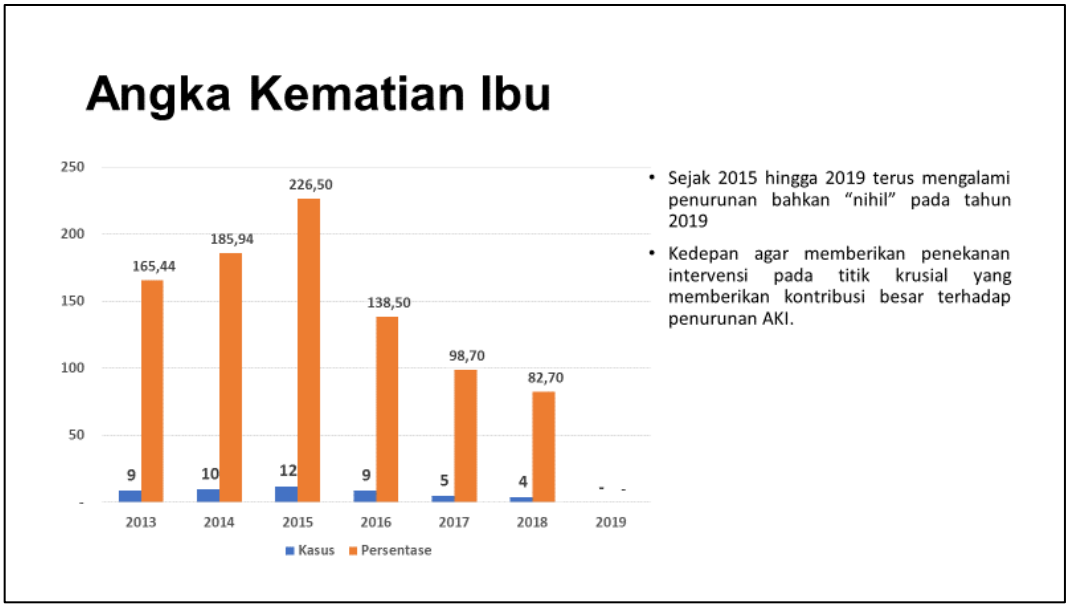
Beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan beberapa indikator lainnya.



Gambar 2.13. Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Pada Grafik di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami penurunan 2,59 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, namun secara umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan. Namun demikian angka ini tentu perlu ditelaah lebih dalam dikarenakan penurunan angka kemiskinan tidak diikuti dengan peningkatan daya beli masyarakat yang justru juga mengalami penurunan.

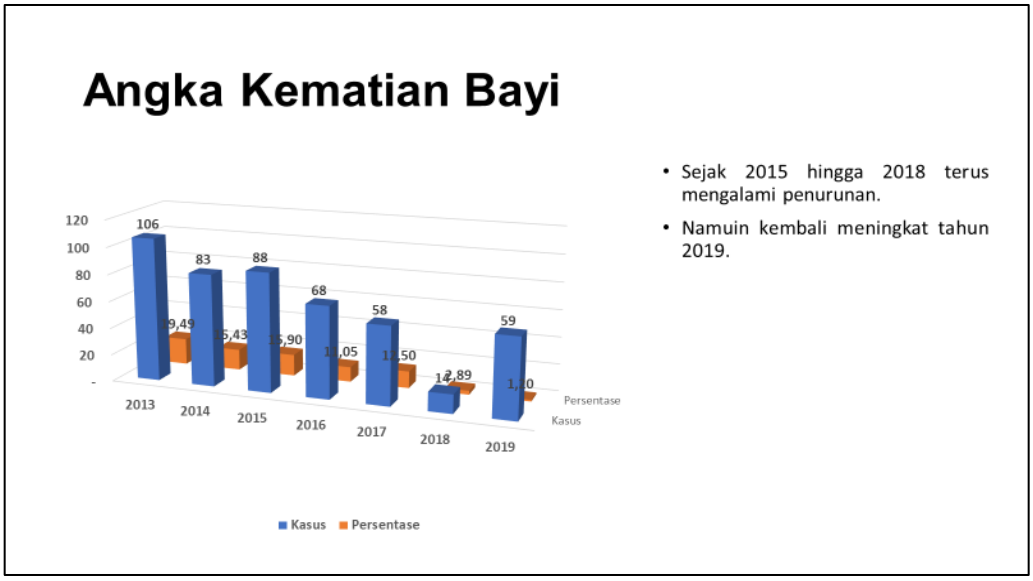
Berikutnya adalah perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Barito Kuala, dimana pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Barito Kuala “nihil” Angka Kematian Ibu pada tahun 2019.



Gambar 2.14. Perkembangan Angka Kematian Ibu

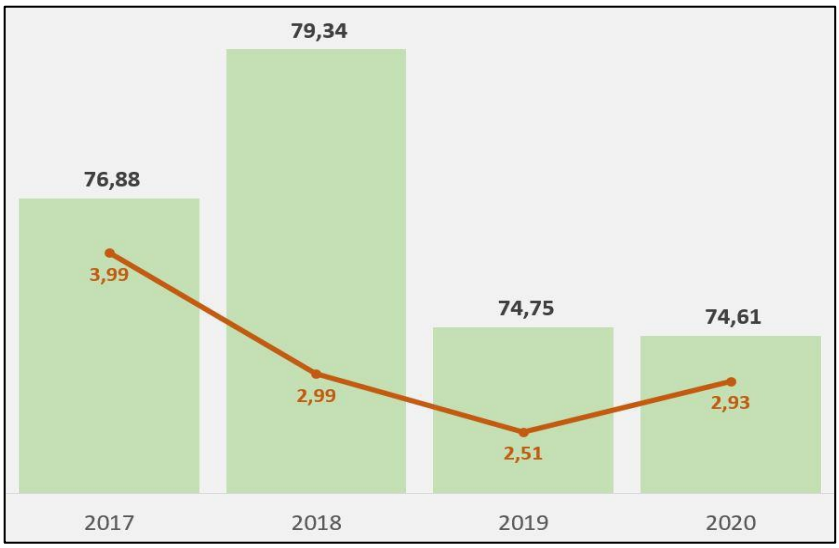
Sejak 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan bahkan "nihil" pada tahun 2019 Kedepan agar memberikan penekanan intervensi pada titik krusial yang memberikan kontribusi besar terhadap penurunan AKI.

Indkator kesejahteraan sosial yang juga tidak kalah penting adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Sejak tahun 2013 hingga 2018 selalu memperlihatkan trend menurun, namun pada tahun 2019 kembali meningkat. Hal ini mencerminkan adanya kondisi khusus yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus kematian bayi di Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 2.15. Perkembangan Angka Kematian Bayi

Sedangkan angka pengangguran di Barito Kuala tahun 2020, berdasarkan publikasi pada website resmi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan/Barito Kuala : https://kalsel.bps.go.id/indicator/6/37/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html adalah sebesar 2,93 , mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 2,51 persen. Berikut adalah perkembangan angka pengangguran Kabupaten Barito Kuala.



Gambar 2.16. Perkembangan angka pengangguran Kab. Barito Kuala

Berdasarkan data pada grafik di atas, angka pengangguran di Barito Kuala tahun 2019, berada pada 2,51 persen dan berada pada posisi peringkat kedua se Kalimantan Selatan. Pada peringkat pertama dengan angka pengangguran terkecil adalah Kabupaten Balangan. Namun pada tahun 2020, angka pengangguran di Barito Kuala mengalami peningkatan. Pada gambar di atas juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan dari 74,75 tahun 2019 menjadi 74,61 pada tahun 2020.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi atau besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu wilayah.

2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito

Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.

Di Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi wisata dan lazim dikunjungi oleh wisatawan seperti Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Jembatan Barito, Jembatan Rumpiang, Cagar Alam Pulau Kaget Alur Sungai Barito, dan Makam Datuk H. Abdussamad. Wisatawan yang berkunjung didominasi wisatawan nusantara sebanyak 103.810 orang. Selain makam Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Jumlah sanggar seni sebanyak 18 buah dan jumlak kelompok seni budaya sebanyak 521 kelompok. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang dan Keroncong.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Barito Kuala merupakan daerah dengan potensi terbesar berada pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga dalam struktur yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yakni berkisar antara 25 sampai dengan 28 persen dari PDRB Kabupaten Barito Kuala.

Salah satu indikator yang di akui secara internasional dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara/regional adalah Produk Domestik Bruto/ PDB (*Gross National Product/GNP*). Pada cakupan yang lebih kecil seperti provinsi atau kabupaten/kota, digunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto/ PDRB yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam dokumen RKPD ini digunakan harga tahun 2010.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kabupaten barito kuala berada pada posisi minus (-) walaupun masih didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dimana pertumbuhan PDRB sektor ini pada tahun 2020 sebesar -1.97% diiringi oleh industri pengolahan -2,35%, konstruksi -2.69% dan perdagangan sebesar -3.43% Berikut beberapa data terkait dengan PDRB di Kabupaten Barito Kuala yang bersumber dari BPS Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta rupiah), 2017-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.121.868,0	2.266.198,9	2.449.040,7	2.423.498,3
B	Pertambangan dan Penggalian	6.364,1	6.736,1	7.275,5	7.271,0
C	Industri Pengolahan	1.270.741,1	1.341.965,1	1.386.893,7	1.372.818,9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	74.54,6	8.470,1	9.127,5	9.841,3
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.9048,0	2.1264,1	2.3125,3	2.4890,9
F	Konstruksi	981.267,5	107.5491,0	117.0986,5	114.8161,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi	887.720,9	987.409,9	1.089.379,0	1.074.013,2

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
	Mobil dan Sepeda Motor				
H	Transportasi dan pergudangan	259.240,2	281.846,2	302.556,3	295.266,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177.123,8	190.991,0	207.018,9	204.986,5
J	Informasi dan Komunikasi	146.353,9	162.089,6	176.530,9	188.051,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	134.936,3	146.148,2	158.922,5	164.522,9
L	Real Estat	254.979,5	279.782,1	306.889,0	321.722,8
M.N	Jasa Peursahaan	114.77,4	12547,0	13.614,8	13.670,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	582.110,7	627.589,5	676.518,7	714.700
P	Jasa Pendidikan	423.438,4	469.857,4	523.745,3	543.205,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.181,1	110.742,4	120.214,7	131.666,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	60.469,2	66.835,0	74.086,2	74.385,6
Produk Domestik Regional Bruto		**7.444.774,7**	**8.055.963,5**	**8.695.925,6**	**8.713.126,7**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Terlihat pada tabel di atas, bahwa PDRB Kabupaten Barito Kuala masih didominasi oleh sektor pertanian disusul oleh sektor industri pengolahan dn pada posisi ketiga adalag konstruksi. Sedangkan PDRB berdasarkan angka konstan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.502.804,4	1.561.774,9	1.628.496,6	1.596.472,8
B	Pertambangan dan Penggalian	4.585,6	4.767,3	5.050,0	5.267,1
C	Industri Pengolahan	877.876,6	906.315,2	923.316,1	901.626,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.989,6	5.350,1	5.599,3	5.869,6
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.646,6	14.739,7	15.808,8	16.856,7
F	Konstruksi	711.967,7	757.091,5	802.233,9	780.652,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	617.467,2	664.909,3	713.595,9	689.110,4
H	Transportasi dan pergudangan	187.165,4	197.103,4	203.802,1	196.929,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130.561,5	137.104,9	145.954,9	141.226,6
J	Informasi dan Komunikasi	119.112,9	128.220,5	136.187,4	145.457,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	94.301,7	97.725,1	102.014,4	105.068,8
L	Real Estat	194.883,8	209.766,2	224.822,1	231.677,1
M.N	Jasa Peursahaan	7.765,5	8.211,7	8.695,9	8.521,8
O	Administrasi Pemerintahan,	387.685,3	402.312,9	423.123,4	441.051,0

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib				
P	Jasa Pendidikan	300.956,0	326.501,2	355.132,3	362.692,9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71.086,6	76.401,9	80.712,6	86.614,2
R,S,T,U	Jasa Lainnya	41.538,6	44.615,0	48.083,0	47.267,8
Produk Domestik Regional Bruto		**5.268.395,0**	**5.542.910,1**	**5.822.628,7**	**5.762.363,7**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Sama seperti pada PDRB berdasarkan harga berlaku, pada PDRB berdasarkan angka konstan, sektor pertanian, industri dan pengolahan dan konstruksi masih menjadi 3 (tiga) besar penyumbang PDRB di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan 2020.

sedangkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memperlihatkan adanya kecenderungan turun dari tahun ke tahun. Kondisi terparah adalah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami minus (-) 1.04. meskipun secara umum di Kalimantan Selatan laju pertumbuhan ekonomi berada pada pertumbuhan minus (-) bahkan secara nasional. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Kuala Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Presen), 2017-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,37	3,92	4,27	(1,97)

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
B	Pertambangan dan Penggalian	4,38	3,96	5,39	4,30
C	Industri Pengolahan	2,44	3,24	1,88	(2,35)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,43	7,23	4,66	4,83
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,96	8,01	7,25	6,63
F	Konstruksi	5,77	6,34	5,96	(2,69)
G	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,77	7,68	7,32	(3,43)
H	Transportasi dan pergudangan	4,92	5,31	3,40	(3,37)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	5,01	6,45	(3,24)
J	Informasi dan Komunikasi	7,29	7,65	6,21	6,81
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,52	3,63	4,39	2,99
L	Real Estat	7,38	7,64	7,18	3,05
M.N	Jasa Perusahaan	6,00	5,75	5,90	(2,00)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,43	3,77	5,17	4,24
P	Jasa Pendidikan	8,45	8,49	8,77	2,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,48	5,64	7,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,75	7,41	7,77	(1,70)
Produk Domestik Regional Bruto		**5,79**	**5,21**	**5,05**	**(1,04)**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.

Dari 17 sektor PDRB, hampir 50 persen mengalami penurunan yakni 8 sektor PDRB dan hanya 9 sektor yang mengalami peningkatan. Kondisi ini tidak berpengaruh untuk mendongkrak posisi laju pertumbuhan ekonomi dari minus (-) menjadi plus (+). Termasuk terhadap 3 (tiga) sektor unggulan Barito Kuala yakni pertanian, industri dan pengolahan dan konstruksi ikut mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Data panjang jalan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kecamatan dan kondisi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (km), 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Kondisi Jalan/*Road Condition*				
	Baik *Good*	Sedang *Average*	Rusak *Damaged*	Rusak Berat *Severely Damaged*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Tabunganen	2,05	25,67	10,60	5,00	43,32
Tamban	3,96	33,23	22,65	9,67	69,51
Mekarsari	11,71	26,28	15,65	6,18	59,81
Anjir Pasar	0,40	13,01	4,40	1,60	19,40
Anjir Muara	2,15	27,55	12,95	6,00	48,65
Alalak	0,47	20,90	10,60	5,28	37,25
Mandastana	0,18	37,79	7,30	2,78	48,05
Jejangkit	3,44	13,69	4,55	0,90	22,58
Belawang	2,32	23,58	17,75	8,62	52,28
Wanaraya	0,20	13,47	4,35	1,74	19,75
Barambai	0,93	10,40	0,67	0,00	12,00
Rantau Badauh	1,91	15,18	3,33	2,94	23,35
Cerbon	1,79	7,31	7,10	0,20	16,40
Bakumpai	6,48	42,33	8,33	4,75	61,89
Marabahan	9,71	15,42	2,00	6,93	34,05
Tabukan	4,64	12,75	3,71	11,50	32,60
Kuripan	0,00	25,55	1,40	0,30	27,25
Barito Kuala	**52,32**	**364,10**	**137,33**	**74,38**	**628,13**

Sumber/*Source* : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala/*Public Work and Spatial Planning Service of Barito Kuala Regency*

https://baritokualakab.bps.go.id

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Tabel 2.7. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, Investasi, dan Nilai Produksi Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	428	570	1 028 862	1 510 247
Tamban	510	816	50 374 500	118 523 599
Mekarsari	347	330	1 412 600	2 305 400
Anjir Pasar	508	569	2 665 605	3 930 539
Anjir Muara	558	687	2 913 500	4 632 199
Alalak	616	2124	100 291 358	210 881 622
Mandastana	435	669	41 658 000	122 175 000
Jejangkit	225	412	229 200	314 000
Belawang	272	347	1 446 826	2 102 175
Wanaraya	324	487	291 600	411 000
Barambai	396	485	1 991 900	2 546 000
Rantau Badauh	453	899	604 500	3 198 398
Cerbon	373	364	886 000	1 089 200
Bakumpai	399	406	1 041 600	1 280 800
Marabahan	509	767	3 501 530	4 800 322
Tabukan	300	413	1 435 600	1 015 600
Kuripan	228	304	390 000	918 000
Barito Kuala	**1809**	**10 649**	**212 703 181**	**481 634 101**

Sumber/*Source*: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
Cooperative Unit, Industry, and Trading Service of Barito Kuala Regency

https://baritokualakab.bps.go.id

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi "Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua". Target ini terdiri dari beberapa target, (1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas, (2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol, (3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif. Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.

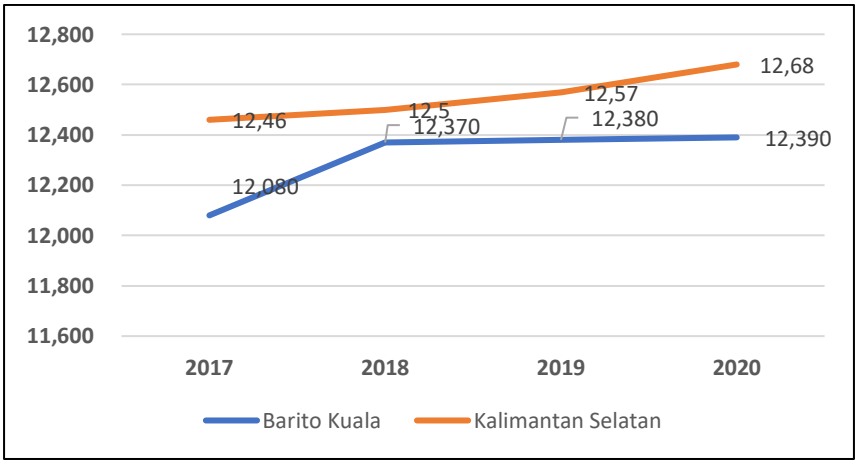
Angka Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Lama Sekolah, dimana target RPJMD tahun 2020 diharapkan mencapai 12.75 Tahun, dan capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 adalah 12,39 tahun. Angka capaiannya diatas target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Pada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan

seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pola perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Barito Kuala memiliki kesamaan dengan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Lama Sekolah sebelumnya 12,37 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,38 tahun pada tahun 2019, yang berarti sudah memasuki bangku perkuliahan (perguruan tinggi) tepatnya pada semester I. Sedangkan capaian pada tahun 2020 adalah 12,39 yang berarti hanya meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun 2019.

Dengan capaian ini posisi Barito Kuala berada pada peringkat 7 (tujuh) dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Berikut perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 sampai dengan 2020.

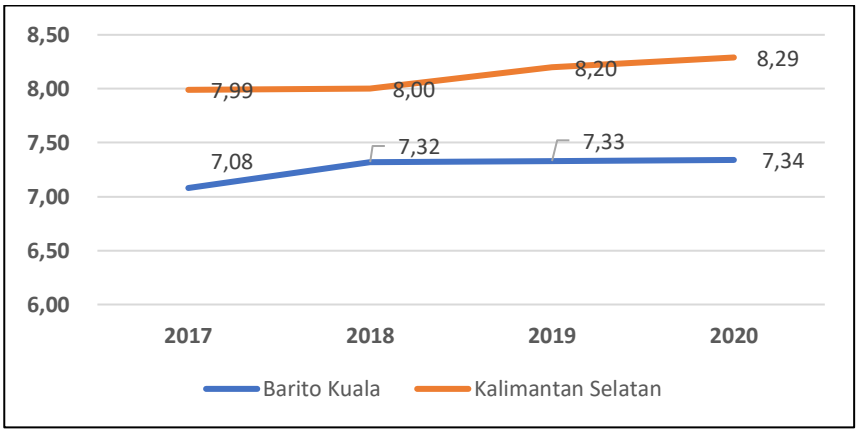


Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Gambar 2.17. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah

Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2018 berada pada posisi 12,37 tahun dan meningkat menjadi 12,43 tahun pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2019 berada pada peringkat 6. Posisi Kabupaten Barito Kuala di atas kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tanah

Bumbu dan Balangan. Sedangkan capaian tahun 2020 adalah sebesar 7,34. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan bentuk upaya keras Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Gambar 2.18. Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

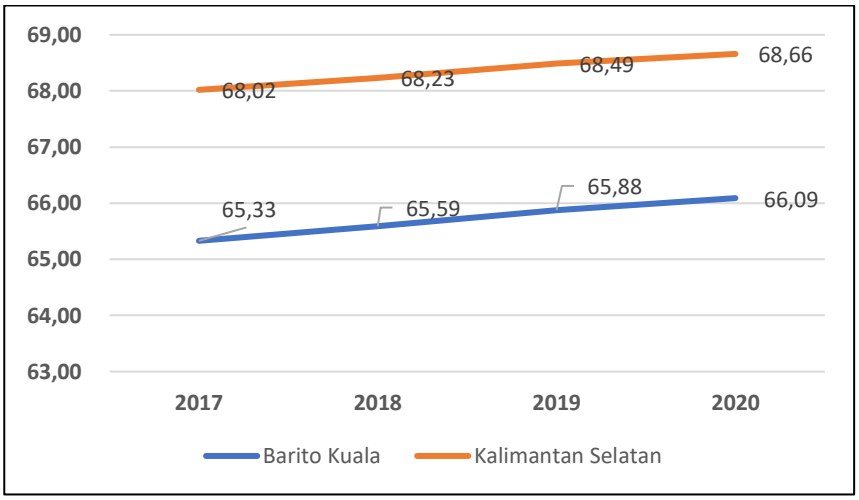
Secara umum, capaian Barito Kuala masih berada di bawah dari capaian Kalimantan Selatan. Barito Kuala tahun 2020, rata-rata lama sekolah mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 sedangkan Kalimantan Selatan 0,20, sehingga Barito Kuala berada pada peringkat terakhir dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

b. Aspek Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Target kinerja pada Indikator Kinerja Utama Daerah Angka Harapan Hidup, dimana target RPJMD tahun 2019 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala

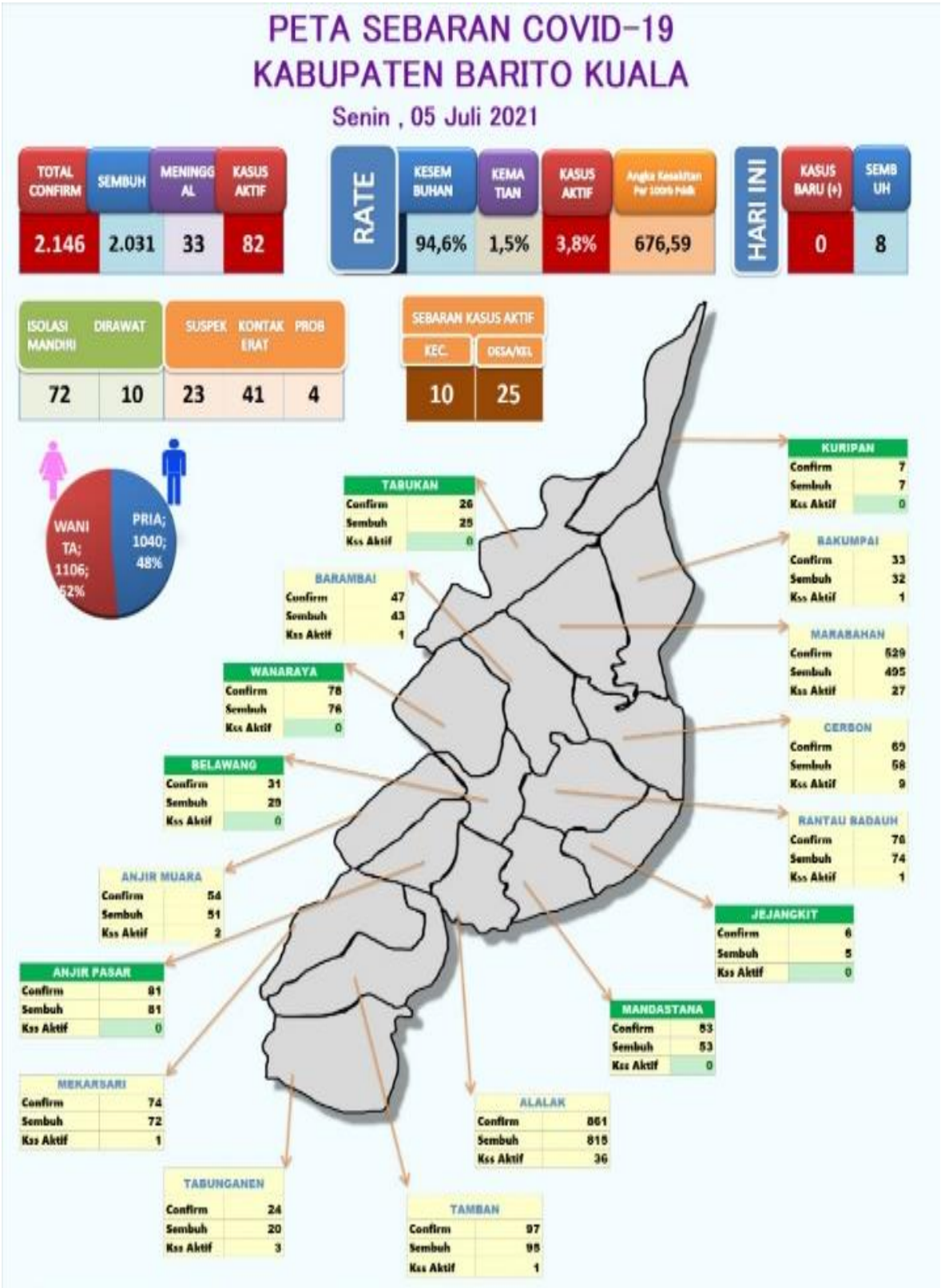
diharapkan mencapai 65,60 Tahun, dan capaiannya pada tahun 2019 adalah 65,88 tahun, berada di atas target RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2019 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 65,88 tahun. Sedangkan capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 66,09.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

Gambar 2.19. Perkembangan Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 adalah sebesar 66,09 mengalami peningkatan sebesar 0,21 dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan berada pada peringkat 10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Meskipun masih berada di bawah dari rata-rata Kalimantan Selatan namun capaian Barito Kuala mampu melampaui Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah.



Sumber : Dinas Kesehatan

Gambar 2.20. Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Barito Kuala

Tabel 2.8. Jumlah Penerima Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Kecamatan *Subdistrict*	Jumlah Penerima Bantuan (kepala keluarga) *Number of Aid Recipient (head of household)*		Jumlah Anggaran (rupiah) *Budget Amount (rupiahs)*	
	Rencana *Planning*	Realisasi *Realization*	Rencana *Planning*	Realisasi *Realization*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tabunganen	1 905	1 845	381 000 000	369 000 000
Tamban	1 259	1 196	251 800 000	239 200 000
Mekarsari	509	440	101 800 000	88 000 000
Anjir Pasar	535	494	107 000 000	98 800 000
Anjir Muara	874	775	174 800 000	155 000 000
Alalak	951	919	190 200 000	183 800 000
Mandastana	363	355	72 600 000	71 000 000
Jejangkit	663	611	132 600 000	122 200 000
Belawang	500	452	100 000 000	90 400 000
Wanaraya	1 098	930	219 600 000	186 000 000
Barambai	548	535	109 600 000	107 000 000
Rantau Badauh	1 296	1 201	259 200 000	240 200 000
Cerbon	425	351	85 000 000	70 200 000
Bakumpai	795	741	159 000 000	148 200 000
Marabahan	1 702	1 538	340 400 000	307 600 000
Tabukan	2 320	2 031	464 000 000	406 200 000
Kuripan	725	625	145 000 000	125 000 000
Barito Kuala	**1 648**	**15 039**	**3 293 600 000**	**3 007 800 000**

https://baritokualakab.bps.go.id

Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas telah disalurkan bantuan sosial terkait Covid-19 kepada UMKM 15.039 Kepala Keluarga yang tersebar di 17 Kecamatan. Sedangkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah menyalurkan bantuan kepada 1000 UMKM yang terdampak Covid-19.

Dalam bidang komunikasi dan informasi, Jumlah blankspot di wilayah Kabupaten Barito Kuala ada 72 desa atau 35,82% dari luas wilayah kabupaten Barito Kuala. Sedangkan data blankspot untuk kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Tabel 2.9 Data Blankspot di Kabupaten Barito Kuala

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS DESA (Km2)	KETERANGAN
1	Marabahan	Kelurahan Marabahan Kota *	221	Tidak blankspot
2		Kelurahan Ulu Benteng		Tidak blankspot
3		Desa Bagus		Tidak blankspot
4		Desa Baliuk		Tidak blankspot
5		Desa Penghulu		Tidak blankspot
6		Desa Antar Baru		Tidak blankspot
7		Desa Antar Jaya		Tidak blankspot
8		Desa Antar Raya		Tidak blankspot
9		Desa Sido Makmur		Tidak blankspot
1	Cerbon	Desa Sungai Kambat		Blankspot
2		Desa Sungai Rasau		Blankspot
3		Desa Simpang Nungki		Blankspot
4		Desa Sawahan		Blankspot
5		Desa Bantuil *	206	Blankspot
6		Desa Badandan		Blankspot
7		Desa Sungai Tunjang		Tidak blankspot
8		Desa Sungai Raya		Blankspot
1	Bakumpai	Kelurahan Lepasan *	261	Tidak blankspot
2		Desa Batik		Tidak blankspot
3		Desa Bahalayung		Tidak blankspot
4		Desa Banua Anyar		Tidak blankspot
5		Desa Murung Raya		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Lirik		Tidak blankspot
7		Desa Banitan		Blankspot
8		Desa Palingkau		Blankspot
9		Desa Balukung		Blankspot
1	Rantau Badauh	Desa Sungai Pantai		Blankspot
2		Desa Pindahan Baru		Blankspot
3		Desa Gampa Asahi		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Gampa *	261.81	Tidak blankspot
5		Desa Sungai Sahurai		Tidak blankspot
6		Desa Simpang Arja		Tidak blankspot
7		Desa Sinar Baru		Blankspot
8		Desa Sungai Bamban		Tidak blankspot
9		Desa Danda Jaya		Tidak blankspot
1	Tabukan	Desa Pantang Jaya		Blankspot
2		Desa Tabukan Raya		Tidak blankspot
3		Desa Taluk Tamba *	166	Blankspot
4		Desa Rantau Bamban		Blankspot
5		Desa Tamba Jaya		Blankspot
6		Desa Muara Pulau		Blankspot
7		Desa Karya Indah		Blankspot
8		Desa Bandar Karya		Blankspot
9		Desa Karya Makmur		Blankspot
10		Desa Karya Jadi		Blankspot
11		Desa Pantang Baru		Blankspot
1	Barambai	Desa Barambai *	183	Tidak blankspot
2		Desa Sungai Kali		Tidak blankspot
3		Desa Pendalaman		Tidak blankspot
4		Desa Bagagap		Tidak blankspot
5		Desa Handil Barambai		Tidak blankspot

6		Desa Pendalaman Baru		Tidak blankspot
7		Desa Barambai Kolam Kiri		Blankspot
8		Desa Barambai Kolam Kanan		Tidak blankspot
9		Desa Karya Tani		Blankspot
10		Desa Karya Baru		Blankspot
11		Desa Barambai Kolam Kiri Dalam		Tidak blankspot
1	Belawang	Desa Rangga Surya		Tidak blankspot
2		Desa Karang Buah		Blankspot
3		Desa Karang Dukuh		Blankspot
4		Desa Samuda		Tidak blankspot
5		Desa Murung Keramat		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Seluang		Tidak blankspot
7		Desa Sungai Seluang Pasar		Tidak blankspot
8		Desa Binaan Baru		Tidak blankspot
9		Desa Belawang *	80.25	Tidak blankspot
10		Desa Parimata		Tidak blankspot
11		Desa Patih Selera		Tidak blankspot
12		Desa Bambangin		Tidak blankspot
13		Desa Suka Ramai		Blankspot
1	Jejangkit	Desa Jejangkit Muara		Tidak blankspot
2		Desa Jejangkit Pasar *	203	Tidak blankspot
3		Desa Sampurna		Tidak blankspot
4		Desa Jejangkit Barat		Tidak blankspot
5		Desa Bahandang		Tidak blankspot
6		Desa Jejangkit Timur		Blankspot
7		Desa Cahaya Baru		Tidak blankspot
1	Mandastana	Desa Lok Rawa		Blankspot
2		Desa Terantang		Blankspot
3		Desa Sungai Ramania		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Puntik Luar *	136	Blankspot
5		Desa Sungai Puntik Tengah		Tidak blankspot
6		Desa Sungai Puntik Dalam		Tidak blankspot
7		Desa Karang Indah		Blankspot
8		Desa Karang Bunga		Blankspot
9		Desa Tabing Rimbah		Tidak blankspot
10		Desa Bangkit Baru		Blankspot
11		Desa Tanipah		Blankspot
12		Desa Tatah Alayung		Tidak blankspot
13		Desa Antasan Segara		Tidak blankspot
14		Desa Pantai Hambawang		Tidak blankspot
1	Wanaraya	Desa Kolam Kiri *	37.5	Tidak blankspot
2		Desa Roham Raya		Tidak blankspot
3		Desa Simpang Jaya		Blankspot
4		Desa Tumih		Tidak blankspot
5		Desa Pinang Habang		Blankspot
6		Desa Waringin Kencana		Blankspot
7		Desa Babat raya		Tidak blankspot
8		Desa Kolam Kanan		Tidak blankspot
9		Desa Sido Mulyo		Tidak blankspot
10		Desa Kolam Makmur		Tidak blankspot
11		Desa Surya Kanta		Blankspot
12		Desa Sumber Rahayu		Blankspot
13		Desa Dwipasari		Blankspot
1	Alalak	Kelurahan Berangas		Tidak blankspot
2		Kelurahan Berangas Barat		Tidak blankspot
3		Kelurahan Handil Bakti *	106.85	Tidak blankspot
4		Desa Pulau Alalak		Tidak blankspot

5		Desa Pulau Sewangi		Tidak blankspot
6		Desa Pulau Sugara		Tidak blankspot
7		Desa Sungai Lumbah		Tidak blankspot
8		Desa Berangas Timur		Tidak blankspot
9		Desa Semangat Bakti		Blankspot
10		Desa Sungai Pitung		Tidak blankspot
11		Desa Balandean Muara		Blankspot
12		Desa Balandean		Blankspot
13		Desa Tanjung Harapan		Blankspot
14		Desa Semangat Dalam		Tidak blankspot
15		Desa Beringin		Tidak blankspot
16		Desa Semangat Karya		Blankspot
17		Desa Panca Karya		Blankspot
18		Desa Tatah Masjid		Tidak blankspot
1	Anjir Muara	Desa Anjir Serapat Muara		Blankspot
2		Desa Anjir Muara Kota *	116.75	Tidak blankspot
3		Desa Patih Muhur		Blankspot
4		Desa Anjir Muara Kota Tengah		Tidak blankspot
5		Desa Anjir Serapat Lama		Tidak blankspot
6		Desa Anjir Serapat Baru		Tidak blankspot
7		Desa Anjir Muara Lama		Tidak blankspot
8		Desa Sungai Punggu		Blankspot
9		Desa Anjir Serapat Baru I		Tidak blankspot
10		Desa Patih Muhur Baru		Blankspot
11		Desa Sungai Punggu Baru		Blankspot
12		Desa Anjir Serapat Muara I		Tidak blankspot
13		Desa Sepakat Bersama		Tidak blankspot
14		Desa Marabahan Baru		Tidak blankspot
15		Desa Beringin Jaya		Tidak blankspot
1	Anjir Pasar	Desa Pandan Sari		Tidak blankspot
2		Desa Andaman		Tidak blankspot
3		Desa Andaman II		Tidak blankspot
4		Desa Anjir Seberang Pasar II		Tidak blankspot
5		Desa Anjir seberang Pasar		Tidak blankspot
6		Desa Anjir Pasar Lama		Tidak blankspot
7		Desa Anjir Pasar Kota II		Tidak blankspot
8		Desa Anjir Pasar Kota *	126	Tidak blankspot
9		Desa Barunai Baru		Tidak blankspot
10		Desa Hilir Masjid		Tidak blankspot
11		Desa Banyiur		Blankspot
12		Desa Danau Karya		Blankspot
13		Desa Mantaren		Blankspot
14		Desa Gandaria		Blankspot
15		Desa Ganda Raya		Blankspot
1	Tamban	Desa Sekata Baru		Blankspot
2		Desa Damsari		Blankspot
3		Desa Purwosari II		Tidak blankspot
4		Desa Sidorejo		Tidak blankspot
5		Desa Koanda		Blankspot
6		Desa Purwosari Baru		Tidak blankspot
7		Desa Tamban Sari Baru		Tidak blankspot
8		Desa Purwosari I *	164.3	Tidak blankspot
9		Desa Tamban Bangun		Tidak blankspot
10		Desa Tamban Bangun Baru		Tidak blankspot
11		Desa Tamban Muara Baru		Blankspot
12		Desa Tamban Muara		Tidak blankspot
13		Desa Tamban Kecil		Tidak blankspot
14		Desa Tinggiran II		Tidak blankspot
15		Desa Jelapat I		Tidak blankspot

16		Desa Jelapat Baru		Tidak blankspot
1	Mekarsari	Desa Mekarsari		Tidak blankspot
2		Desa Tamban Raya *	143.5	Blankspot
3		Desa Tinggiran Tengah		Tidak blankspot
4		Desa Tinggiran Darat		Tidak blankspot
5		Desa Jelapat II		Blankspot
6		Desa Tamban Raya Baru		Tidak blankspot
7		Desa Tinggiran Baru		Blankspot
8		Desa Karang Mekar		Tidak blankspot
9		Desa Indah Sari		Tidak blankspot
1	Tabunganen	Desa Kuala Lupak		Tidak blankspot
2		Desa Sungai Telan Besar		Tidak blankspot
3		Desa Sungai Telan Kecil		Tidak blankspot
4		Desa Sungai Telan Muara		Tidak blankspot
5		Desa Tabunganen Muara		Tidak blankspot
6		Desa Tabunganen Kecil *	240	Blankspot
7		Desa Tabunganen Tengah		Tidak blankspot
8		Desa Karya Baru		Tidak blankspot
9		Desa Tabunganen Pemurus		Tidak blankspot
10		Desa Tanggul Rejo		Blankspot
11		Desa Beringin Kencana		Tidak blankspot
12		Desa Sungai Teras Dalam		Tidak blankspot
13		Desa Sungai Teras Luar		Tidak blankspot
14		Desa Sungai Jingah Besar		Tidak blankspot
1	Kuripan	Desa Jambu Baru		Tidak blankspot
2		Desa Jambu		Blankspot
3		Desa Kabuau		Tidak blankspot
4		Desa Asia Baru		Blankspot
5		Desa Jarenang		Blankspot
6		Desa Kuripan		Tidak blankspot
7		Desa Rimbun Tulang *	343.5	Tidak blankspot
8		Desa Tabatan		Tidak blankspot
9		Desa Tabatan Baru		Blankspot

Sumber : Rumah Data Kabupaten Barito Kuala

Tabel 2.10 Data Dermaga Pelabuhan dan Dermaga Penyebrangan di Kabupaten Barito Kuala

NO	Nama Pelabuhan (Sesuai dengan Nama Pelabuhan dalam KP 432/2017)	Jenis Dermaga	Lokasi Pelabuhan	Kondisi Pelabuhan (Baik / Rusak Sedang / Rusak Berat)*	Aktifitas di Pelabuhan (Penumpang/ Barang/Penumpang & Barang)*	Titik Koordinat
1	2	3	5	9	`10	11
Dermaga Sungai						
1	Dermaga Kuripan	Dermaga Sungai	Kec. Kuripan	B	pnp,barang	02" 36' 500" LS 114" 47' 639" BT
2	Dermaga Tabukan	Dermaga Sungai	Kec. Tabukan	RS	barang	03" 48.440' LS 114" 38.177' BT
3	Dermaga Marabahan	Dermaga Sungai	Kec. Marabahan	B	pnp,barang	03" 58.719' LS 114" 46.133' BT
4	Dermaga Ujung Panti	Dermaga Sungai	Kec. Alalak	RB	pnp,barang	03" 13' 50" LS 114" 32' 47" BT
5	Dermaga Mandastana	Dermaga Sungai	Kec. Mandastana	RS	barang	03" 13'39.75"" LS 114"40'06.89" BT
6	Dermaga Handil Bakti	Dermaga Sungai	Kec. Alalak	RB	barang	03" 16' 46" LS 114" 35' 46 BT
7	Dermaga Pasar Tabunganen Kecil	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	barang	03" 24.600' LS 114" 29.314' BT
8	Dermaga Tamban Km.6	Dermaga Sungai	Kec. Tamban	B	barang	03" 19'58,36"" LS 114" 28'37,63" BT
9	Dermaga Anjir Muara	Dermaga Sungai	Kec. Anjir Muara	RS	barang	03 " 412.060' LS 114" 32.749' BT
10	Dermaga Anjir Pasar KM.18	Dermaga Sungai	Kec. Anjir Pasar	RS	barang	03 " 09.011' LS 114" 30.060' BT
11	Dermaga Anjir Pasar KM.14	Dermaga Sungai	Kec. Anjir Pasar	RS	barang	03 " 07.581' LS 114" 28.796' BT
12	Dermaga Mekarsari KM.17	Dermaga Sungai	Kec. Mekarsari	RS	pnp,barang	03 " 15' 54" LS 114" 24' 45" BT
13	Dermaga Tamban KM.4	Dermaga Sungai	Kec. Tamban	RB	pnp,barang	03 " 20' 18" LS 114" 29' 43" BT
14	Dermaga Lepasan	Dermaga Sungai	Kec. Bakumpai	B	pnp	02" 58'32.31" LS 114" 46'11.12" BT
15	Dermaga desa Tabunganen Tengah	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	RS	pnp	03 " 20' 18" LS 114" 29' 43" BT
16	Dermaga Mesjid Mekarsari KM.15	Dermaga Sungai	Kec. Mekarsari	RS	pnp	03 " 16' 45" LS 114" 25' 21" BT
17	Dermaga Bantuil	Dermaga Sungai	Kec. Cerbon	B	pnp	03 " 01' 06" LS 114" 46' 20" BT
18	Dermaga Sukaramai	Dermaga Sungai	Kec. Belawang	B	pnp	03" 04'41.30" LS 114" 38'34,08" BT
19	Dermaga pasar Mekarsari KM.17	Dermaga Sungai	Kec. Mekarsari	B	pnp,barang	03 " 15' 54" LS 114" 24' 45" BT
20	Dermaga Desa Sungai Telan Muara	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 25.780' LS 114" 29.777' BT
21	Dermaga Tabunganen Kecil	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 24.599' LS 114" 29.271' BT
22	Dermaga Desa Pendalaman Lama Kec Barambai	Dermaga Sungai	Kec. Barambai	B	pnp,barang	03" 01'31.30" LS 114" 41'22,68" BT
23	Dermaga Tabunganen Pemurus	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 25.466' LS 114" 27.289' BT
24	Dermaga desa Tabunganen Tengah	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	RS	pnp,barang	03" 25'16.10" LS 114" 28'30,12" BT
25	Dermaga Desa Tabunganen Tengah	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 25 '03.77" LS 114" 29'24.50" BT
26	Dermaga Desa Tabunganen Pemurus	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 25 '28.32" LS 114" 17'21.66" BT
27	Dermaga Pasar Marabahan	Dermaga Sungai	Kec. Marabahan	RB	pnp,barang	02 " 58.430' LS 114" 46,1,0' BT
28	Dermaga sungai Telan Muara	Dermaga Sungai	Kec. Tabunganen	B	pnp,barang	03 " 25 '49.80" LS 114" 29,40.58" BT
Dermaga Penyeberangan						
29	Dermaga Penyeberangan Pantang raya	Dermaga Penyeberangan	Kec. Tabukan	B	pnp,barang	02 " 49.035' LS 114" 35.869' BT
30	Dermaga Ulu Benteng	Dermaga Penyeberangan	Kec. Marabahan	B	pnp	03 " 58 '39.34" LS 114" 45'55.01" BT
31	Dermaga Murung raya	Dermaga Penyeberangan	Kec. Bakumpai	RB	pnp	03 " 58 '29.85" LS 114" 46'10.96" BT
32	Dermaga Lepasan RD 2	Dermaga Penyeberangan	Kec. Bakumpai	RB	pnp	03 " 58'31.79" LS 114" 46'10.73" BT
33	Dermaga Tarutan marabahan (RD2)	Dermaga Penyeberangan	Kec. Marabahan	RS	pnp	03 " 58'46.24" LS 114" 46'13.26" BT
34	Dermaga Pendalaman Baru	Dermaga Penyeberangan	Kec. Barambai	RB	pnp	03 " 03' 19" LS 114" 42' 42" BT
35	Dermaga Sungai Gampa	Dermaga Penyeberangan	Kec. Rantau badauh	RB	pnp	03 " 03' 33" LS 114" 42' 48" BT
36	Dermaga patih Selera (RD2/4)	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	B	pnp	03 " 05.171' LS 114" 38.251' BT
37	Bermaga Binaan Baru	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	RS	pnp	03 " 07.541' LS 114" 35.520' BT
38	Dermaga Murung Keramat	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	RB	pnp	03 " 07.597' LS 114" 35.707' BT
39	Dermaga Berangas Alalak	Dermaga Penyeberangan	Kec. Alalak	RS	pnp	03 " 15 '17.44" LS 114" 33'48.47" BT
40	Dermaga Jelapat baru	Dermaga Penyeberangan	Kec. Tamban	RS	pnp	03 " 15 '04.47" LS 114" 32'49.97" BT
41	Dermaga Jelapat 1	Dermaga Penyeberangan	Kec. Tamban	B	pnp	03 " 15' 49" LS 114" 33' 05" BT
42	Dermaga Sakakajang	Dermaga Penyeberangan	Kec. Tamban	B	pnp	03 " 19' 50" LS 114" 32' 55" BT
43	Dermaga Balukung Lama	Dermaga Penyeberangan	Kec. Bakumpai	B	pnp	02 " 48.274' LS 114" 46.751' BT
44	Dermaga Desa Jambu	Dermaga Penyeberangan	Kec. Kuripan	B	pnp	02 " 42.939' LS 114" 45.921' BT
45	Dermaga Desa Muara Pulau	Dermaga Penyeberangan	Kec. Kuripan	B	pnp	02 " 43.637' LS 114" 44.857' BT
46	Dermaga Desa Palingkau	Dermaga Penyeberangan	Kec. Bakumpai	B	pnp	02 " 52.406' LS 114" 48.152' BT
47	Dermaga Desa Semuda	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	B	pnp	03 " 07.082' LS 114" 36.733' BT
48	Dermaga Balukung Baru	Dermaga Penyeberangan	Kec. Bakumpai	B	pnp	02 " 48.091' LS 114" 46.839' BT
49	Dermaga Bambangin (RD 2)	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	B	pnp	03 " 05.032' LS 114" 38.162' BT
50	Dermaga Bambangin (RD 4)	Dermaga Penyeberangan	Kec. Belawang	B	pnp barang	03 " 05.093' LS 114" 38.111' BT
51	Dermaga Jarenang	Dermaga Penyeberangan	Kec. Kuripan	B	pnp	

Sumber : Rumah Data Kabupaten Barito Kuala

Untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar sungai telah dibangun 28 buah dermaga sungai dan 23 buah dermaga penyebrangan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020, jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Barito Kuala berjumlah 140 buah program yang terbagi kedalam kelompok program pada urusan wajib yag berkaitan dengan pelayanan dasar,

program pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, program pada urusan pilihan dan program pada urusan penunjang pemerintahan. Terdapat 108 program dengan capaian sesuai target yakni 100 persen (sesuai target), 31 program dengan tingkat capaian dibawah 100 persen dan hanya ada 1 program dengan tingkat capaian diatas 100 persen (melebihi target).

2.2.1. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Tabel 2.11. Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian dibawah Target

No	Nama Program	Realisasi	Kreteria
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Kesehatan			
1	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	87,50	Tinggi
2	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	87,28	Tinggi
3	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	22,20	Sangat Rendah
Bidang Pendidikan			
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun-Sekretariat	88,41	Tinggi
2	Program Pendidikan Non Formal	94,44	Sangat Tinggi
Bidang Pekerjan Umum dan Penataan Ruang			
1	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jarinngan Pengairan	99,43	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Pengelolaan, Dan Kenservasi Sungau, Danau Dan Sumber Daya	99,86	Sangat Tinggi
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyaraka			
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	1,33	Sangat Rendah
Bidang Sosial			
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Disabilitas	97,14	Sangat Tinggi
2	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	87,10	Tinggi
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,59	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98,70	Sangat Tinggi
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	66,67	Sedang
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Program Keluarga Berencana	90,47	Tinggi
Bidang Pangan			
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	95,59	Sangat Tinggi

Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	66,67	Sedang
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	89,28	Tinggi
3	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	0,00	Sangat Rendah
Bidang Perhubungan			
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	73,33	Sedang
Bidang Komunikasi dan Informatika			
1	Program Pengelolaan Komunikasi Publik	50,00	Sangat Rendah
2	Program Pengembangan Fasilitasi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service	0,00	Sangat Rendah
3	Program Pengembangan Infrastruktur Tik	97,77	Sangat Tinggi
Bidang Koperasi dan UKM			
1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	90,00	Tinggi
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	92,86	Sangat Tinggi
Bidang Pertanian			
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	85,71	Tinggi
Bidang Perdagangan			
1	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	65,91	Rendah
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	80,46	Tinggi
Bidang Perindustrian			
1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	90,00	Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			
Bidang Pengawasan			
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan	73,74	Sedang
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur	53,57	Rendah
Bidang Perencanaan			
1	Program Perencanaan Fisik Dan Prasarana	52,38	Rendah
Bidang Kepegawaian			
1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	95,95	Sangat Tinggi

2.2.2. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja

Tabel 2.12. Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian sesuai Target

No	Nama Program	Realisasi	Kreteria
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Kesehatan			
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Bidang Sekretariat	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan-Bidang Sekretariat	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat-Bidang Pelayanan Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan-Bidang Pelayanan Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat-Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Keluarga Berencana-Bidang Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat-Bidang Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Kesehatan Reproduksi Remaja-Bidang Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
11	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	100,00	Sangat Tinggi
12	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
13	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100,00	Sangat Tinggi
15	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100,00	Sangat Tinggi
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100,00	Sangat Tinggi
18	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	100,00	Sangat Tinggi
19	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
20	Program Pengawasan Obat Dan Makanan-Bidang Sumber Daya Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
21	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	100,00	Sangat Tinggi
22	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
23	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	Sangat Tinggi
24	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100,00	Sangat Tinggi
25	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata	100,00	Sangat Tinggi
26	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rs Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pendidikan			
1	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan-Pembinaan Sd	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun-Pembinaan Smp	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan-Pembinaan Smp	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pendidikan Anak Usia Dini-Pembinaan Paud Dan Dikmas	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan-Pembinaan Paud Dan Dikmas	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini-Sarana Dan Prasarana	100,00	Sangat Tinggi
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun-Sarana Dan Prasarana	100,00	Sangat Tinggi
10	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	100,00	Sangat Tinggi

Bidang Pekerjan Umum dan Penataan Ruang			
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Perencanaan Tata Ruang	100,00	Sangat Tinggi
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100,00	Sangat Tinggi
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Program Pengembangan Perumahan	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pembangunan Dan Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi
			Sangat Tinggi
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyaraka			
1	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Penanggulangan Kebakaran	100,00	Sangat Tinggi
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Tenaga Kerja			
1	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pertanahan			
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	100,00	Sangat Tinggi

Bidang Lingkungan Hidup			
1	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Perhubungan			
1	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Komunikasi dan Informatika			
1	Program Pengelolaan Informasi Publik	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pengembangan Aplikasi Dan Sistem Informasi	100,00	Sangat Tinggi
6	Program Pengembangan Ekosistem Dan Tata Kelola E-Government	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Koperasi dan UKM			
1	Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Penanaman Modal			
1	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Kepemudaan			
1	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Kebudayaan			
1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Perpustakaan			
1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Kearsipan			
1	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	100,00	Sangat Tinggi

URUSAN PILIHAN			
Bidang Kelautan dan Perikanan			
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pariwisata			
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pertanian			
1	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	100,00	Sangat Tinggi
4	Program Pengembangan Lahan Dan Air	100,00	Sangat Tinggi
5	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Transmigrasi			
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Pengembangan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi	100,00	Sangat Tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			
Bidang Perencanaan			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100,00	Sangat Tinggi
3	Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Penelitian dan Pengembangan			
1	Program Kajian Dan Penelitian	100,00	Sangat Tinggi
2	Penguatan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Keaungan			
1	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
2	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	100,00	Sangat Tinggi
Bidang Pendidikan dan Pelatihan			
1	Program Pendidikan Kedinasan	100,00	Sangat Tinggi

2.2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja

Tabel 2.13. Daftar Program Perangkat Daerah dengan Capaian sesuai Target

No	Nama Program	Realisasi	Kreteria
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Pendidikan			
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun-Pembinaan SD	140,83	Sangat Tinggi

2.2.4. Fakto-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan

Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang capaiannya dibawah target, sama dengan target dan yang melebihi target kinerja nantinya akan dilakukan analisis faktor penyebab dari posisi tingkat capaian kinerja program dan kegiatan tersebut, sehingga kedepan dapat dijadikan referensi bagi perangkat daerah bahkan pemerintah daerah untuk kebijakan pembangunan tahun 2022.

Selain capaian program, evaluasi juga dilakukan terhadap pencapaian target kinerja pada indikator kinerja daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14. Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Misi I **MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA**				
	Sasaran 1 ***Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Prasarana, Sarana dan Prasarana Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman***				
1	Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan	Persen	65	51,96	79,93

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2	Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan	Persen	55	45,92	83,49
	Sasaran 2 ***Meningkatnya Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan***				
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	51,01	54,13	106,11
	Misi II **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN**				
	Sasaran 3 ***Meningkatnya Budidaya dan Diversifikasi Usaha Sektor Pertanian***				
4	Persentase pertumbuhan sektor pertanian	Persen	1,82	-1,97	-108,24
	Sasaran 4 ***Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat***				
5	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,28	80,00
6	PDRB per kapita	Juta Rupiah	25,25	27,47	108,79
	Sasaran 5 ***Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal***				
7	Peningkatan PAD	Persen	15,60	167,96	1.076,67
	Misi III **MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**				
	Sasaran 6 ***Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat***				
8	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,67	12,39	98,45
9	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	66,10	66,90	97,79
	Sasaran 7 ***Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat***				
10	Tingkat pengangguran	Persen	0,87	2,91	-334,48
11	Tingkat kemiskinan	Persen	4,48	4,51	-100,67
	Misi IV				

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI				
	Sasaran 8 ***Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan***				
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,00	52,47	74,96
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95,99	84,00	87,51
14	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP	76,55	67,61	88,32
	Sasaran 9 ***Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***				
15	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan)	Persen	80,50	35,85	44,51

a. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama hasil RPJMD 2017-2022 berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tahun 2017-2022, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut.

Sasaran 1.

MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PRASARANA, SARANA DAN PRASARANA UTILITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu :

1) Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan
2) Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan

Indikator kinerja pertama

PERSENTASE KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Gambaran capaian beberapa indikator yang mempengaruhi capaian indikator ketersediaan infrastruktur perdesaan dalam membangun desa pada tahun 2020 adalah:

Pertama, persentase luas lahan pertanian yang terlayani irigasi sampai tahun 2020 adalah sebesar 20.300 ha dari total luas lahan pertanian kabupaten Barito Kuala yaitu 29.723 Ha atau terealisasi sebesar 68,3% dari target yang telah ditentukan yaitu 67% dengan capaian 102% atau melebihi target, dilaksanakan pada 41 Daerah rawa irigasi (DIR) pada 5 kecamatan. Untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, Dinas PUPR telah melaksanakan beberapa program yaitu :

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan.
2. Program pembangunan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan rehabilitasi saluran sepanjang 334 km, melakukan pembangunan 6 buah pintu air, dan merehabilitasi 2 Daerah Irigasi Rawa (DIR) kabupaten. Dinas PUPR juga melakukan rehabilitasi jalan dan jembatan inspeksi sepanjang 10 km untuk membantu pemeliharaan jaringan irigasi dan meningkatkan akses ke wilayah pertanian.

Kedua, persentase penduduk yang mendapat akses air minum. Pada tahun 2020 penduduk yang mendapat akses air minum sebesar 63,33 % dari target 67,75% atau sejumlah 201.324 jiwa dari jumlah penduduk Barito Kuala yaitu 317.922 jiwa. Rendahnya capaian ini dikarenakan berakhirnya program penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) pada Tahun 2020. Namun demikian untuk pengembangan penyediaan air bersih di desa-desa yang belum memiliki pengelolaan air bersih, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengembangkan teknologi air bersih yaitu Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) dari desa Jejangkit Timur. Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa program yaitu :

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
2. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pengembangan sistem distribusi air minum sebanyak 5.500 meter unit dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan sebanyak 3 unit.

Ketiga, persentase rumah tangga yang mendapat pelayanan sanitasi. Adapun capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah 7,10% dari target sebesar 7,01% atau dengan capaian 101%. Pencapaian ini dilakukan dengan membangun MCK komunal yang sesuai dengan syarat kesehatan untuk melayani masyarakat dalam penanggulangan air limbah.

Indikator Kinerja Kedua

PERSENTASE KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Gambaran capaian beberapa indikator yang mempengaruhi capaian indikator persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan di ibukota Kabupaten dan Kecamatan untuk tahun 2020 adalah :

Kesatu, persentase sarana dan prasarana perkantoran dan publik yang sesuai standar, pada tahun 2020 realisasi adalah sebesar 80% dengan target sebesar 80% sehinga capaiannya adalah 100%. Untuk mencapai target ini dilakukan beberapa program yaitu :

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas sebanyak 3 unit, pembangunan sarana dan prasarana umum sebanyak 17 unit, pembangunan/rehabilitasi gedung kantor sebanyak 12 unit dan peningkatan jalan sepanjang 2.040 m.

Kedua, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 68,3% dari target yaitu 67,8% sehingga capaiannya adalah sebesar 101% atau sepanjang 429,2 km dari total panjang jalan kabupaten Barito Kuala 628,13 km sesuai Surat Keputusan Bupati Barito Kuala No. 144.45/301/KUM/2009 tentang penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan Kabupaten Barito Kuala. Untuk mencapai target ini maka telah dilakukan beberapa program yaitu :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
2. Program rehebilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi peningkatan/ pembangunan jalan sepanjang 46,7 km, pembangunan jembatan sebanyak 10 buah, pembangunan 17 buah gorong-gorong, pembangunan siring sepanjang 100 m, rehabilitasi jalan sepanjang 10 km dan rehabilitasi jembatan sebanyak 100 buah.

Ketiga, persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sampai tahun 2020 persentase RTH di Kabupaten Barito Kuala mencapai 0,665% dari target sebesar 0,635% sehingga capaiannya sebesar 105% atau mencapai luasan sebesar 64,42 ha dari total keseluruhan RTH seluas 10.215 ha. Luasan tersebut meningkat sedikit dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 0,625 % atau hanya mencapai 63,53 ha. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan RTH dari bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PUPR.

Keempat, Persentase rancangan produk hukum penataan ruang berupa penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang. Dari target 17 dokumen yang ditetapkan pada tahun 2020 baru tercapai 4 dokumen di 2 kawasan atau realisasinya mencapai 23%. Rendahnya capaian tersebut disebabkan adanya pengurangan anggaran atau recofusing untuk penanganan Covid-19. Untuk mencapai target ini dilaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang dan Program pengendalian pemanfataan ruang. Sedangkan kegiatannya meliputi penyusunan rencana detail Tata Ruang kawasan sebanyak 2 dokumen RDTR, survey dan pemetaan sebanyak 2 kawasan dan sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfataan ruang sebanyak 2 kegiatan.

Kelima, persentase penurunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pada tahun 2020 terealisasi sebesar 5,05 Ha dari target sebesar 63,27 Ha. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berhasil menurunkan kawasan permukiman kumuh yang semula 188,31 Ha pada tahun 2019 menjadi 183,26 Ha pada tahun 2020. Di kabupaten Barito Kuala jumlah seluruh kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 251,08 Ha. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/98/KUM/2017 tanggal 20 Februari 2017 terdiri dari kawasan permukiman Perkotaan dan Perdesaan. Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan tidak tersedianya alokasi anggaran biaya yang memadai dalam menangani suatu kawasan permukiman kumuh.

Keenam, persentase peningkatan komplek perumahan dan permukiman dengan PSU yang memadai. Pada Tahun 2020 terealisasi sebesar 23,38% atau 18 komplek perumahan yang sudah memiliki PSU memadai dari target sebesar 32,47% atau 25 komplek Perumahan dari 77 buah keseluruhan komplek perumahan. Capaian tersebut menurun apabila dibandingkan

dengan tahun 2019 yang terealisasi sebanyak 24 komplek perumahan yang sudah memiliki PSU memadai dari target sebanyak 50 komplek perumahan. Rendahnya capaian tersebut disebabkan karena adanya refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan target lokasi dari 25 komplek perumahan hanya menjadi 18 komplek perumahan. Namun secara umum telah terjadi penambahan jumlah komplek perumahan yang ditingkatkan kualitas PSU nya yaitu sebanyak 72% dari yang ditargetkan.

Indikator Persentase Komplek Perumahan dan Lingkungan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum yang memadai didukung oleh kegiatan Pembangunan dan Peningkatan jalan-jalan lingkungan, Pembangunan Jaringan Air Bersih dalam bentuk dokumen DED Perencanaan Jaringan distribusi, Pengadaan dan pemasangan PJU, pembangunan/revitalisasi ruang terbuka public serta pembangunan/revitalisasi areal pemakaman.

Sasaran 2.

MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan.

IndiIkator Kinerja Ketiga

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN

Bagian-bagian yang mempengaruhi angka IKL ini adalah Indeks Kualiatas Air (IKA), indeks Kualitas Udara (IKU) dan Timbulan sampah dan Prosentase Tutupan Hutan. Pada Tahun 2020 terealisasi Indeks Kualitas Lingkungan sebesar 54,13 dari target sebesar 51,01. Pelampauan target ini lebih disebabkan oleh terjadinya perubahan mekanisme perhitungan secara nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Disamping itu juga adanya berbagai upaya pengendalian terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan yang menjadi fokus dari kegitan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup termasuk penanganan persampahan di Kabupaten Barito Kuala semakin baik.

Gambaran capaian kinerja beberapa indikator yang mempengaruhi capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kesatu, Indeks Kualitas Air (IKA), capaian IKA sampai tahun 2020 sudah berada pada angka 52,61 dari target 59,00 maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerjanya adalah 89,16%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 70,15, maka capain tahun 2020 mengalami penurunan.

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kualitatif yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sedangkan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA adalah sebanyak 10 (sepuluh) parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TTS, Faecal Coli, Nitrat, Amoniak, TDS, Total Phospat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Target Kinerja Indeks Kulitas Air (IKA) dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu melakukan pengukuran pada DAS Barito, anak sungai yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan dengan menggunakan dana APBD sebanyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun semester I dan IIsebanyak 60 titik lokasi sampel PDAM, anak sungai, dermaga, muara anak sungai, bawah jembatan, pelabuhan dan pulaudan dengan menggunakan anggaran dana APBN dilakukan analisis perhitungan pengolahan data. di sepanjang sungai Barito, diantaranya di intake PDAM, anak sungai, dermaga, muara anak sungai, bawah jembatan, pelabuhan dan pulau. Dari hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa status mutu air di kabupaten Barito Kuala tahun 2020 di sepanjang sungai Barito dikategorikan cemar ringan dengan indeks 52,61.

Kedua, Indeks Kualitas Udara (IKU), pada tahun 2020 kualitas udara berada pada indeks 92,19 dari target sebesar 92,87. Menurun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu sebesar 92,96, namun untuk baku mutu kualitas udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, kriteria kualitas Udara Kabupaten Barito kuala tergolong sangat baik.

Dengan menggunakan metode passive sampler selama 14 hari untuk 2 (dua) periode, dan data yang diperoleh akan menjadi data indeks kualitas udara yang resmi. Pada tahun 2020 telah dilakukan pengujian dan pemantauan kualitas udara yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

di 4 lokasi titik sampel, yaitu transportasi, industri, perumahan, dan perkantoran, menggunakan metode passive sampler.

Ketiga, pengurangan timbulan sampah skala kabupaten, realisasinya sampai tahun 2020 sudah berada pada angka 22,08 % dari target 22% atau dengan capaian sebesar 100,36%, meningkat dari tahun 2019 yang hanya mencapai 20,30%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi mengurangi timbulan sampah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh masyarakat berupa TPS3R, bank sampah, pengurangan penggunaan kantongan plastik, dan penggunaan thumbler dan tempat makanan yang dapat diguna ulang, sampah yang ada dikelola lapak/swasta. Sampah yang dikelola berasal permukiman penduduk, tempat umum dan tempat perdagangan, sarana layanan masyarakat milik pemerintah, industri berat dan ringan, serta pertanian. Maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk indicator kinerja Utama ini adalah 100,36%.

Keempat, persentase tutupan hutan yaitu adalah kondisi fisik permukaan bumi baik alami ataupun buatan, dalam hal ini ditumbuhi oleh vegetasi alami ataupun buatan sedangkan prosentase tutupan lahan adalah persentase kondisi fisik permukaan bumi yang ditumbuhi oleh vegetasi alami ataupun buatan.

Persentase Tutupan Hutan pada tahun 2020 terealisasi sebesar 4,679 % dari target sebesar 4,679% atau dengan luas lahan sebesar 14.039,815 Ha dari target sebesar 14.039,815 Ha atau capaiannya sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung untuk pencapaian tersebut meliputi penanaman pohon di ruang terbuka hijau (RTH) sebanyak 100 pohon di hutan kota, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kuala Lupak sebanyak 1019 pohon mangrove, penanaman pohon di kampung Iklim (Proklim) sebanyak 290 pohon. Dengan demikian jumlah penanaman sebanyak 2309 pohon.

Berhasilnya capaian Indikator di atas disebabkan:

1. Bertambahnya kegiatan sosialisasi dan frekuensi pembinaan ke desa terkait pelaksanaan program kampuk iklim (Proklim).
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan baik pelajar peduli lingkungan, saka kalpataru, Forum Komunitas Hijau, Masyarakat Peduli Sampah, dan Organisasi Pecinta Lingkungan lainnya.
3. Adanya peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

4. Adanya Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui penggunaan thumbler dan tempat makanan yang bisa diguna ulang.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan di kabupaten Barito Kuala yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah serta pihak swasta.
6. Adanya dukungan Dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan rendahnya capaian di atas disebabkan :

1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan/ masyarakat untuk membuat dokumen lingkungan dalam pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan dan koordinasi penyusunan AMDAL seperti izin lingkungan (AMDAL-UKL-UPL dan SPPL).
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani perizinan lingkungan terkait berkembangnya dunia usaha dan pertauran tentang lingkungan.
3. Adanya pandemi COVID-19 berimbas terhadap pengurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengkajian dampak lingkungan dan koordinasi penyusunan AMDAL.
4. Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, sehingga jasa/pelayanan analisa laboratorium masih terbatas dan akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD serta masih terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium.
5. Bertambahnya kegiatan sosialisasi dan frekuensi pembinaan ke desa terkait pelaksanaan program kampuk iklim (Proklim).
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan baik pelajar peduli lingkungan, saka kalpataru, Forum Komunitas Hijau, Masyarakat Peduli Sampah, dan Organisasi Pecinta Lingkungan lainnya.
7. Adanya peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
8. Adanya Instruksi Bupati Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui penggunaan thumbler dan tempat makanan yang bisa diguna ulang.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana persampahan di kabupaten Barito Kuala yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah serta pihak swasta.
10. Adanya dukungan Dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus.

Sasaran 3.

MENINGKATNYA BUDIDAYA DAN DIVERSIFIKASI USAHA SEKTOR PERTANIAN

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu persentase pertumbuhan sektor pertanian.

Indikator Kinerja Keempat

PERSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN

Sektor pertanian merupakan sektor andalan di Kabupaten Barito Kuala sektor ini meliputi beberapa kegiatan usaha yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan hasil hutan. Gambaran capaian kinerja sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan yang mendukung capaian pertumbuhan sektor pertanian adalah sebagai berikut :

Kesatu, capaian kinerja sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh subsektor produksi dan produktivitas tanaman pangan, serta subsektor produksi dan produktivitas hortikultura. Rinciannya adalah capaian produksi padi sebanyak 237.193,34 ton dengan capaian produktivitas sebanyak 35,59 ku/ha, produksi jagung sebanyak 6.795 ton dengan produktivitas 52,08 ku/ha, dan produksi kedelai sebanyak 765 ton dengan produktivitas 12,63 ku/ha. Kalau dibandingkan capaian tahun 2019, produksi dan produktivitas komoditas padi pada tahun 2020 mengalami penurunan, produksi turun dari 284.558,93 ton menjadi 237.193,34 ton, produktivitas turun dari 36,00 ku/ha menjadi 35,59 ku/ha. Komoditas kedelai, produksinya naik dari 596,48 ton menjadi 765 ton, namun untuk produktivitasnya menurun dari 12,80 ku/ha menjadi 12,63 ku/ha. Sedangkan komoditas jagung, produksinya menurun dari 8.806,14 ton menjadi 6.795 ton, namun produktivitasnya naik dari 48,20 ku/ha menjadi hanya 49,03 ku/ha. Untuk komoditas hortikultura, sampai tahun 2020 rata-rata capaian produksinya sebesar 106,35 % dan capaian produktivitasnya sebesar 90,78 %. Rinciannya adalah capaian produksi jeruk sebesar 95.953,00 ton dan capaian produktivitasnya sebesar 170,85 ku/ha, produksi nenas tamban sebesar 12.546,00 ton dan produktivitasnya sebesar 810,65 ku/ha, produksi kuini anjir sebesar 4.085,00 ton dan produktivitasnya sebesar 117,15 ku/ha, produksi cabai rawit sebesar 985,00 ton dan produktivitasnya 29,28 ku/ha, produksi cabai besar 847,60 ton dan produktivitasnya 27,07 ku/ha, dan produksi bawang merah sebesar 8,50 ton dan produktivitasnya sebesar 56,65 ku/ha. Kalau dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, produksi jeruk pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari 93.531,51 ton menjadi 95.953,00 ton, begitupun dengan produktivitasnya meningkat dari 168,95 ku/ha menjadi 170,85 ku/ha. Produksi nenas tamban meningkat dari 11.973,20 ton menjadi 12.546,00 ton, dan produktivitasnya juga meningkat dari 791,14 ku/ha menjadi 810,65 ku/ha. Produksi kuini anjir tahun 2019 belum ada datanya sehingga tidak bisa disampaikan, sedangkan produktivitasnya meningkat dari 114,29 ku/ha menjadi 117,15 ku/ha. Cabai rawit produksinya meningkat dari 548,75 ton menjadi 985,00 ton dan produktivitasnya juga meningkat dari 17,23 ku/ha menjadi hanya 29,28 ku/ha. Cabai besar produksinya naik dari 558,00 ton menjadi 847,60 ton dan

produktivitasnya turun dari 31,30 menjadi 27,07. Sedangkan produksi bawang merah turun dari 68 ton menjadi 8,50 ton dan produktivitasnya juga menurun dari 90,10 ku/ha menjadi 56,65 ku/ha.

Faktor yang mempengaruhi rendahnya beberapa capaian produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura adalah disebabkan oleh terjadinya pandemi COVID-19 yang berpengaruh besar sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok atau komoditi tanaman pangan dan hortikultura juga menurun, termasuk permintaan pasar pun menurun. Hal ini berdampak pada menurunnya minat petani untuk membudidayakan komoditi, karena apabila luas tanam dan luas panen dinaikkan maka harga pasar akan semakin rendah maka petani akan merugi. Selanjutnya terbatasnya ketersediaan bibit unggul komoditas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu ke depannya akan difokuskan untuk menyediakan, melayani dan mendistribusikan bibit secara tepat dan sesuai kebutuhan.

Kedua, jumlah produksi perikanan, sampai tahun 2020 telah tercapai sebesar 19.857,13 ton berasal dari perikanan budidaya tambak, kolam, karamba, keramba jaring apung (KJA), dan mina padi, ditambah perikanan tangkap di perairan laut dan umum. Perikanan budidaya menyumbang produksi sebesar 10.470,00 ton atau 100 % dari target 10.470 ton dan perikanan tangkap menyumbang produksi sebesar 9.387,84 ton atau 100,38 % dari target 9.352 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah produksi perikanan tahun 2020 mengalami peningkatan dari 19.441,84 ton menjadi 19.857,13 ton atau mengalami peningkatan 1.02 %. Meningkatnya produksi tahun 2020 ditunjang dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Bantuan sarana dan prasarana budidaya kepada kelompok budidaya ikan berupa benih dan pakan melalui dana APBD dan Percontohan Nila di kolam, Budidaya lele dan patin di kolam yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan kepada kelompok penangkapan melalui dana APBD dan alat penangkapan ikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Dilaksanakannya pendampingan terhadap kelompok budidaya melalui sosialisasi melaksanakan cara berbudidaya ikan yang baik dan temu usaha yang merupakan ajang berkumpulnya para pelaku usaha perikanan untuk berbagi informasi. Pendampingan juga dilakukan terhadap kelompok perikanan tangkap melalui bintek pengembangan usaha perikanan tangkap bagi nelayan.
4. Menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dengan penanganan kasus illegal fishing melalui pemberkasan kasus. Sampai akhir tahun 2020 tidak ada kasus

yang ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.

5. Menjaga hasil produksi perikanan supaya tidak cepat rusak dan merangsang peningkatan konsumsi ikan, dilaksanakan diversifikasi olahan ikan melalui demo pengolahan ikan pada masyarakat nelayan.

Dalam pencapaian sasaran ini juga ada permasalahan yang di hadapi antara lain :

1. Perubahan kualitas air pada sungai akibat perubahan cuaca yang menjadi lokasi karamba dan karamba jarring apung sehingga menyebabkan mortalitas yang cukup tinggi.
2. Kurangnya koordinasi antara penyuluh perikanan sebagai enumerator data dengan pihak Dinas, menyebabkan penghitungan statistik tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
3. Kurangnya skill dan keahlian masyarakat dalam melaksanakan cara budidaya ikan yang baik (cbib).

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perikanan.

Dari permasalahan tersebut diatas maka perlu dilakukan :

1. Pengecekkan kualitas air secara berkala.
2. Melaksanakan rapat/pertemuan setiap bulan dengan semua karyawan/karayawati Dinas dan Penyuluh perikanan untuk melakukan sharing informasi.
3. Melakukan Pendampingan kelompok pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik, manajemen dan administrasi kelompok.
4. Melaksanakan razia illegal fishing sampai pemberkasannya.

Ketiga, jumlah produksi perkebunan, yang mendukung jumlah produksi perkebunan yaitu terdiri dari produksi kelapa sawit, karet, dan kelapa. Pada tahun 2020 jumlah produksi perkebunan mencapai 12.036.287 kg berasal dari produksi kelapa sawit sebesar 7.937.032 kg, berasal dari produksi karet sebesar 1.356.240 kg, dan berasal dari produksi kelapa sebesar 2.743.015 kg, terjadi kenaikan apabila dibandingkan dengan 2019 yang hanya mencapai 7.471.880 kg, berasal dari produksi kelapa sawit sebesar 4.042.299 kg, karet sebesar 788.494 kg dan kelapa sebesar 2.641.087 kg.

Peningkatan produksi kelapa sawit, karet, dan kelapa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penambahan luas tanam perkebunan rakyat, penambahan luas tanam menghasilkan.
2. Mulai meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan terutama kelapa sawit dan karet.

3. Pembinaan dan bimbingan teknis kepada pekebun secara intensif dalam peningkatan produksi perkebunan.
4. Dukungan peningkatan intensifikasi tanaman antara lain peningkatan pemeliharaan tanaman seperti pemberian pupuk seuai dosis (bantuan stimulant pupuk), pembersihan lahan, peremajaan dan pemakaian bibit unggul, SDM pekebun yang terlatih dan penerapan teknologi serta menerapkan panca usaha tani.
5. Mulai membaiknya harga komoditas karet dari sebelumnya dikisaran Rp. 5.000,- menjadi dikisaran Rp. 6.000,- sampai Rp. 7.500,- juga memberikan motivasi kepada pekebun untuk meningkatkan produksi.

Keempat, jumlah produksi peternakan, Indikator ini diperoleh dari data jumlah produksi daging ternak sapi potong dan ternak ayam potong. Daging ternak sapi potong dan daging ayam potong dijadikan sebagai indicator karena dikarenakan keduanya merupakan konsumsi tertinggi masyarakat di kabupaten Barito Kuala. Sampai tahun 2020 realisasinya mencapai 6,03% atau dengan capaian 100,50% dengan jumlah sebesar 1.623.999 ton yang berasal dari komoditas sapi potong sebanyak 1.525.371 ton dan komoditas ayam ras pedaging sebesar 98.628 ton. Dibandingkan dengan tahun 2019 maka tahun 2020 mengalami peningkatan Jumlah produksi daging ternak. Realisasi tahun 2019 hanya mencapai 1.527.428 ton yang berasal dari komoditas sapi potong sebanyak 1.434.110 ton dan komoditas ayam ras pedaging sebanyak 93.318 ton. Keberhasilan capaian jumlah produksi ternak dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan gizi yang berkualitas.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam usaha peternakan rakyat terutama pada usaha pemotongan ternak ayam potong (ayam ras pedaging).
3. Pembinaan dan bimbingan teknis kepada peternak secara intensif dalam peningkatan populasi peternakan.
4. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan hewan, ketersediaan obat dan vaksin ternak, ketersediaan tenaga medic veteriner, tenaga paramedik veteriner, tenaga keurmaster daging ternak dan operasionalisasi Rumah potong.

Sasaran 4.

MENINGKATNYA PRODUKSI PELAKU USAHA DAN TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu :

1. Indeks Gini
2. PDRB Per Kapita

Indikator Kinerja Kelima

INDEKS GINI

Gini rasio atau indeks gini merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk dalam suatu daerah. Indeks gini di Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2020 mencapai 0,27 dari target sebesar 0,35. Ini menunjukan pemerataan pendapatan di Barito Kuala hampir merata dan tiap tahunnya terus menurun mendekat ke arah angka nol yang merupakan angka terbaik yang artinya tidak ada lagi kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang dapat dijadikan acuan adalah capaian angka Indeks Gini (Gini Ratio). Meskipun kondisi ini masih tergolong berada pada tingkat kesenjangan yang tinggi, namun trend angka yang semakin mendekati ke angka "0" tentu sebuah gambaran kondisi yang semakin baik. Kedepan Indeks Gini akan diupayakan agar berada pada kisaran angka di bawah 0,30 sehingga kesenjangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tidak semakin jauh antar penduduk. Upaya pemerataan pendapatan dilakukan pemerintah dengan pemberdayaan penduduk menjadi penduduk yang produktif sesuai bidang usaha yang digeluti. Terutama pada pengembangan wirausahan-wirausahan baru maupun wirausahawan yang sudah ada.Kebanyakan usaha produktif mereka laksanakan bergerak pada usaha perdagangan dan usaha jasa lainnya.

Indikator Kinerja Keenam

PDRB PERKAPITA

PDRB perkapita merupakan suatu ukuran pendapatan yang dapat dianggap menggambarkan tingkat pendapatan tiap penduduk pada suatu daerah. PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sudah mencapai Rp 27.471.000,00 dengan capaian sebesar 108,79%. Meningkatnya PDRB perkapita melampaui angka tahun sebelumnya cukup unik ditengah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara global, regional maupun

lokal dimana pertumbuhan ekonomi atau PDRB kabupaten Barito Kuala tumbuh -1,04%. Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitasnya masih rendah. Meningkatnya angka ini disebabkan laju signifikan sektor sekunder dan tersier, diantaranya sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi yang merupakan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dan efek multiplier yang cukup tinggi. Diharapkan kedepan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi dengan pengeluaran perkapita yang tidak jauh beda. Gambaran umum capaian indikator yang mendukung capaian PDRB perkapita pada tahun 2020 adalah :

Kesatu, jumlah pelaku UKM, sampai tahun 2020 mencapai 35.965 orang, terdiri dari usaha mikro berjumlah 35.405 buah, usaha kecil 490 buah, dan usaha menengah sebanyak 70 buah. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 35.844 buah, terdiri dari usaha mikro berjumlah 35.284, usaha kecil 490, dan usaha menengah sebanyak 70 buah. Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro telah dilakukan pembinaan kepada usaha mikro berupa kegiatan pelatihan pengolahan, pengemasan dan pemasaran produksi, hasilnya adalah meningkatnya dua usaha mikro menjadi usaha kecil.

Kedua, jumlah koperasi yang berprestasi, sampai tahun 2020 jumlah koperasi mencapai 121 buah dengan jumlah anggota sebanyak 31.703 orang, sedangkan jumlah koperasi yang berprestasi sebanyak 44 buah atau mencapai 36,3 %. Adapun dana yang dikelola sebesar Rp. 9.421.680.000,-. Jumlah koperasi tersebut meningkat dibanding jumlah tahun 2019 yang hanya mencapai 120 buah, dengan jumlah koperasi yang berprestasi sebanyak 43 buah.

Ketiga, jumlah investasi yang berusaha di Kabupaten Barito Kuala baik dari penanaman modal asing dan dalam negeri pada tahun 2020 sebesar Rp. 295.801.400.000,- dari target Rp. 250.000.000.000 atau tercapai sebesar 118,32% namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp. 331.501.600.000,. Rendahnya capaian tahun 2020 disebabkan pelaku usaha tidak kontinue dan konsisten dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) berupa jumlah nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Barito Kuala, ketergantungan sumber pengolahan data dan informasi pada database Badan Koordinasi Pengolahan Penanaman Modal (BKPM), sarana dan prasarana yang tidak memadai serta adanya keterbatasan akses database di BKPM untuk menginventarisasi data yang lebih rinci. Namun demikian upaya-upaya yang menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan jumlah investasi ke depannya telah dilakukan melalui koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, meningkatkan perhatian dan

partisipasi/kesadaran dari pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM, meningkatkan informasi dari media massa, melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, serta melaksanakan dan mengikuti pameran investasi/promosi daerah.

Keempat, pembinaan kawasan transmigrasi, pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa program untuk lebih mengembangkan kawasan transmigrasi. Tujuannya adalah untuk lebih mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal, dan meningkatkan infrastruktur kawasan transmigrasi, mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha dalam rangka peningkatan kualitas SDM sehingga meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, merencanakan kegiatan pelatihan pengembangan peningkatan usaha untuk pelaku usaha di kawasan Transmigrasi melalui kajian dan FGD yang dilaksanakan dengan melibatkan stake holder yang terkait.

Kegiatan yang menunjang pengembangan kawasan transmigrasi meliputi kajian Pengembangan Ekonomi Inklusif di Kawasan Transmigrasi sebanyak 58 orang dan FGD Identifikasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka penguatan produk unggulan di Kawasaan Transmigrasi sebanyak 32 orang. Selain itu melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelatihan pelatihan yang telah dilaksanakan dalam keterkaitan dengan Usaha yang mereka jalankan termasuk dalam aspek manajemen pengelolaan dan peningkatan daya saing para pelaku usaha di Kawasan Transmigrasi. Untuk pengembangan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal telah dilaksanakan pelatihan pengolahan jamur krispy beserta kemasannya, dan fasilitasi pengembangan BUMDES di kawasan transmigrasi.Untuk mendukung dan mempermudah akses transportasi dan ekonomi transmigran ke daerah pasar dilaksanakan peningkatan jalan di kawasan transmigrasi sepanjang 2 km. Upaya ini sangat bermanfaat untuk lebih meningkatkan penghasilan keluarga transmigran.

Sasaran 5.

MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI LOKAL

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan yaitu Peningkatan PAD.

Indikator Kinerja Ketujuh

PENINGKATAN PAD

Sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala peningkatan pendapatan diharapkan terus meningkat karena pada daerah yang sudah maju mereka dapat membangun daerah mereka sendiri dengan modal sendiri yang tunjang dari PAD tersebut.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten Barito Kuala persentasinya relatif kecil jika dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya dalam struktur APBD Kabupaten Barito Kuala. Target peningkatan PAD Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 mencapai angka 167,96% dari target yang telah ditetapkan yaitu 15,60%, atau tercapai 1.076,66%, dengan nilai sebesar Rp. 74,3 milyar lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp. 71,8 milyar. Kedepan penting untuk dilakukan rasionalisasi target PAD agar tidak terlalu jauh dengan hasil yang dicapai yakni dengan memproyeksikan PAD pada kisaran angka optimis dan identifikasi berbagai sumber-sumber pendapatan potensial di Barito Kuala.

Berbagai upaya yang terkait dengan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan telah dilaksanakan terutama oleh SKPD penanggung jawab/pengampu khususnya untuk pajak dan retribusi daerah meliputi antara lain :

1. Menyusun rencana potensi pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi melalui penerapan kewajiban melampirkan lunas PBB P2, ekstensifikasi potensi melalui kerjasama BPN kantah Batola/PTSL, mendekatkan pelayanan melalui aplikasi Desa/Kelurahan, intensifikasi atas objek pajak yang telah didata, ekstensifikasi pendataan potensi bersinergi dengan pemerintahan desa/kelurahan, rencana PKS dengan Kementerian Keuangan (Bea Cukai), penggalian potensi oleh perusahaan yang mengeksploitasi air tanah, melakukan up date harga tanah sebagai dasar penetapan BPHTB.
2. Melakukan up date data melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak daerah.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui penambahan SDM, melakukan Bintek, Diklat, dan house training bekerjasama dengan DJP Kalselteng, KPP Pratama Batara, Kementerian Keuangan dan Perguruan Tinggi UI/STAN.
4. Memfokuskan anggaran untuk pemenuhan fasilitas penunjang, seperti aplikasi untuk kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2020, PAD Barito Kuala yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mencapai Rp. 26.972.626.885,- lebih tinggi dari target sebesar Rp. 19.326.848.421,-, namun menurun jika dibandingkan capaian tahun 2019 yang sebesar Rp. 32.460.811.901,-. Menurunnya pendapatan pada tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan realisasi pajak BPHTB yang disebabkan pajak yang berasal dari BPHTB tidak bisa diprediksi karena mulai tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak lagi memberikan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit, sehingga pajak BPHTB dari sektor perkebunan tidak ada lagi, padahal selama ini sector perkebunan merupakan penyumbang pajak BPHTB terbesar.

Sasaran 6.

MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu :

1. Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) (Tahun)
2. Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun)

Indikator Kinerja Kedelapan

ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (AHS) dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun.

Angka Harapan Lama Sekolah dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2020 capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala adalah 12,39 tahun lebih rendah dari target 12,63 tahun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 12,38 tahun.

Pada perhitungan Angka Harapan Lama Sekolah ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Pola perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Barito Kuala memiliki kesamaan dengan perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Lama Sekolah sebelumnya 12,52 tahun pada tahun 2019 dan masih tetap sama 12,52 tahun pada tahun 2020, yang berarti sudah memasuki bangku perkuliahan (perguruan tinggi) tepatnya pada semester I. Bila dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2020 berada pada peringkat 7. Posisi Kabupaten Barito Kuala di atas kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu.

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah ini merupakan bentuk upaya keras Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun.

Gambaran capaian kinerja harapan lama sekolah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kesatu, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 65,03% dari target 65,00%. Meningkat apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 yang mencapai 63,03%. Capaian indikator persentase Angka Partisipasi kasar (APK) PAUD Tahun 2020 didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kegiatan pembangunan gedung sekolah, pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir, rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
2. Program Pendidikan non formal, dengan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.

Selain itu juga adanya upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang belajar untuk menampung peserta didik usia 4-6 tahun yang tiap tahunnya terus meningkat, meningkatkan keompetensi tenaga pendidik, serta penerapan sistem dan informasi manajemen. Keberhasilan capaian indicator ini disebabkan telah tercapainya target program dan kegiatan

yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dan keberhasilan capaian indicator diharapkan dapat dipertahankan melalui penguatan program-program utama.

Kedua, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 106,57% dari target 106,55. Meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 105,01%. Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI didukung oleh program dan kegiatan yaitu Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dengan kegiatan pembangunan gedung sekolah, pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pengadaan mebeluer sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pembangunan jamban siswa/guru, rehab jamban siswa/guru, pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah, dan rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah. Kemudian adanya upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang belajar untuk menampung peserta didik usia 7-12 tahun yang tiap tahunnya terus meningkat, meningkatkan keompetensi tenaga pendidik, serta penerapan sistem dan informasi manajemen.

Ketiga, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs, pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 99,96% dari target 99,95%. Meningkat dibanding tahun 2019 yang hanya mencapai 99,91%. Peningkatan ini didukung adanya program dan kegiatan berupa penambahan ruang kelas sekolah, pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pengadaan meubeler sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelaas sekolah, pembangunan jamban siswa/guru, rehab jamban siswa/guru, rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah, rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah, rehabilitasi seang/berat ruang guru sekolah, dan pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah. Selain itu juga meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang belajar untuk menampung peserta didik Sekolah usia 13-15 tahun yang tiap tahunnya terus meningkat, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta penerapan sistem dan informasi manajemen.

Indikator Kinerja Kesembilan

ANGKA HARAPAN HIDUP

Keberhasilan Pembangunan pada bidang kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Angka Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik.

Angka Harapan Hidup diukur sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Pada tahun 2020 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala terealisasi mencapai 66,09 tahun dari target sebesar 65,83 tahun dengan capaian 100,39%, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 65,73 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2020 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 66,09 tahun.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berada di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Angka Harapan Hidup penduduk yang sebelumnya 68,23 tahun pada tahun 2019 meningkat menjadi 68,46 tahun pada tahun 2020. Bila dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi relative Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 berada pada peringkat 12. Posisi Kabupaten Barito Kuala berada di atas kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Angka Harapan hidup Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan secara terus menerus, sebagai bukti bahwa terjadi beberapa perbaikan terhadap pembangunan bidang kesehatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik sebagai dampak dari kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Gambaran capaian kinerja kesehatan untuk mendukung capaian kinerja angka harapan hidup adalah sebagai berikut :

Kesatu, kasus kematian ibu, pada tahun 2020 angka kematian ibu di Kabupaten Barito Kuala sebesar 6 kasus, meningkat dibanding capaian tahun 2019 yang terdapat 0 kasus. Terjadinya kematian ibu disebabkan oleh :

1. Pendarahan dan PEB/Klamasi 2 kasus.
2. Hipertensi sebanyak 4 kasus.

Meningkatnya Kasus kematian Ibu pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 dikarenakan :

1. Masih ada desa yang belum memiliki bidan desanya.
2. Bidan desa masih dianggap masyarakat sebagai pemberi pelayanan kesehatan (One For All).

3. Tidak ada dana untuk melakukan rujukan pemeriksaan USG kehamilan pada masyarakat miskin.
4. Masih banyaknya pernikahan dini, tidak ada lagi jaminan kesehatan daerah dan banyak masyarakat belum menjadi anggota BPJS.
5. Sebagian masyarakat masih takut untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit, serta serta masih adanya persalinan melalui dukun kampung.

Kedua, kasus kematian bayi, pada tahun 2020 angka kematian bayi mencapai 48 kasus, menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 59 kasus. Adapun beberapa sebab terjadinya kasus kematian bayi dikarenakan :

1. Kematian Neonetral umur 0 – 28 hari sebanyak 40 Kasus yakni : BBLR sebanyak 18 kasus, Asfiksia sebanyak 5 kasus, Sepsis sebanyak 1 Kasus, kelainan bawaan sebanyak 7 kasus dan lain-lain sebanyak 5 kasus.
2. Kematian Post Neonatal umur 29 hari – 11 bulan sebanyak 8 kasus yakni : Pnemonia sebanyak 2 kasus, diare sebanyak 1 kasus dan lain-lain sebanyak 5 kasus.

Adapun beberapa hal yang mendukung dalam penurunan angka kematian bayi yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan pemantauan kehamilan dan persalinan.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya persalinan yang ditolong di fasilitas kesehatan sesuai standar.

Ketiga, persentase Balita stunting, pada tahun 2020 persentase Balita stunting mencapai 17 %, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang mencapai 26%. Hal ini disebabkan adanya peran lintas sektor dan lintas program untuk mendorong kebijakan akses pangan bergizi, akses air bersih dan sanitasi. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat survelains gizi masyarakat sehingga dapat dideteksi secara dini permasalahan gizi di masyarakat.

Sasaran 7.

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING MASYARAKAT

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu :

1. Tingkat Pengangguran
2. Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja Kesepuluh

TINGKAT PENGANGGURAN

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran di kabupaten Barito Kuala mencapai 2,91% dari target sebesar 0,87%. Berarti tingkat pengangguran masih relatif tinggi, berada pada urutan ketiga dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dan berada di atas capaian rata-rata provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,74%.

Walaupun capaian tahun 2020 belum mencapai target, namun seiring dengan semakin kondusifnya iklim penciptaan lapangan kerja di Barito Kuala, tingkat pengangguran mendapatkan dampak positif dari kondisi tersebut. Ketersediaan infrastruktur dasar cukup memberikan kontribusi terhadap semakin tumbuhnya dan berkembangnya ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer. Komposisi yang paling memberikan dampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perkembangan jumlah angkatan kerja, perkembangan jumlah angka pengangguran dan perkembangan jumlah lapangan kerja yang tersedia.Ketiga unsur ini menjadi titik intervensi pembangunan bidang ketenagakerjaan di Barito Kuala melalui berbagai program unggulan bidang ketenagakerjaan.

Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja/angkatan kerja (pembuat AK1) yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala sebanyak 656 orang, Sedangkan penempatan tenaga kerja/yang bekerja/wirausaha di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 sebanyak 155 orang, terdiri laki-laki 66 orang dan perempuan sebanyak 89 orang tersebar di Kabupaten Barito Kuala, sebagian didominasi sektor informal/wirausaha mandiri.

Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas kerja tersebut antara lain:

1. Pengolah Hasil Pertanian/ Pembuatan Kue sebanyak 16 orang.

2. Pelatihan keterampilan pengolahan hasil pertanian / pembuatan kue sebanyak 16 orang.
3. Pelatihan service sepeda motor konvensional sebanyak 32 orang peserta lulus;
4. Pelatihan menjahit dengan mesin sebanyak 32 orang peserta lulus;
5. Pelatihan komputer dasar 2 sebanyak 32 orang peserta lulus;
6. Pelatihan membuat roti sebanyak 32 orang peserta lulus.

Indikator Kinerja Kesebelas

TINGKAT KEMISKINAN

Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di kabupaten Barito Kuala mencapai 4,51 % dari target 4,87 % atau dengan capaian sebesar 106,43%, didasarkan pada perhitungan Garis Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 340.526,00 per jiwa per bulan.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2020 berada di atas Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,38 %. Bila dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Kalimantan Selatan, maka posisi Kabupaten Barito Kuala berada pada peringkat 7 di atas kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Tanah Bumbu dan Balangan.

Gambaran capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 dilihat dari kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sampai tahun 2020 persentase penyandang PMKS yang mandiri sebesar 79,6 % menurun dibanding tahun 2019 yang mencapai 92,3 %. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 sehingga bantuan KUBE untuk keluarga miskin tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian ada beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan antara lain : bedah rumah PKK yang bisa dilaksanakan untuk 8 Kepala Keluarga (KK), bantuan bedah rumah tak layak huni 1 buah, pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan dan keterampilan di Panti PSBR/PSBW sebanyak 33 orang, pendampingan dan pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 8.064 KPM.

Sasaran 8.

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 3 indikator kinerja yang digunakan, yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Indikator Kinerja Kedua Belas

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Terkait dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2020 adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanan reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB diperoleh Indeks sebesar 52,47 dari target 70,00, atau mencapai 74,96 %.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Barito Kuala, pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa upaya sesuai rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020 sebagai berikut:

1. Melakukan Reviu Rencana Aksi yang tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi agar lebih jelas arah, sasaran dan indikator keberhasilannya, termasuk menyusun beberapa kegiatan lintas area perubahan. Reviu tersebut juga telah diintegrasikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biorkrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Tahapan akhir adalah melakukan penetapan legalitas Road Map Reformasi Birokrasi dengan Peraturan Bupati.
2. Membentuk agen–agen perubahan pada masing-masing SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/169/kum/2020 tentang Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mengintensifkan peran agen perubahan, dalam beberapa kegiatan penguatan Reformasi Birokrasi selalu melibatkan agen perubahan, seperti kegiatan asistensi penguatan Tim Reformasi Birokrasi dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB, kami mengikutsertakan beberapa orang agen perubahan dari SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan. Begitu pula pada saat penyusunan rencana aksi dan kegiatan reformasi birokrasi selalu melibatkan agen perubahan.
3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi kepada seluruh perangkat daerah. Seperti melaksanakan sosialisasi dan internalisasi penerapan reformasi birokrasi kepada semua pimpinan SKPD dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.kemudian melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana kegiatan reformasi birokrasi dan persiapan

evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 kepada semua perangkat daerah melalui Video Conference dengan melibatkan pimpinan SKPD, Sekretaris dan agen perubahan SKPD.

4. Mendorong SKPD untuk melakukan identifikasi produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan penyederhanaan reformasi birokrasi dan pengendalian, meliputi Peraturan Daerah terkait retribusi, pajak dan yang bersifat pengaturan, kemudian Peraturan kepala Daerah Yang berkaitan dengan standar pelayanan dan SOP pelayanan serta Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pentapan untuk selanjutnya diprogramkan pada Prolegda Tahun 2021 dan 2022. Selain itu, untuk kesesuaian dan sinkronisasi peraturan, maka dilakukan fasilitas rancangan Propemperda dengan Pemerintah Provinsi.
5. Melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala nomor 188.46/166/Kum/2020 tentang Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memetakan dan mengintegrasikan program dan kegiatan utama untuk pencapaian visi, misi dan tujuan di RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Kemudian juga telah melakukan reviu struktur organisasi berbasis kinerja. Tujuan dari reviu ini adalah untuk memetakan organisasi yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung pencapaian RPJMD Tahun 2018-2022.
6. Melakukan reviu standar pelayanan dan SOP Pelayanan. Sampai saat ini sudah ada 132 SOP yang selesai di reviu, sedangkan standar pelayanan masih dalam tahap proses reviu oleh SKPD.
7. Menggunakan capaian kinerja individu untuk pengembangan kompetensi pegawai, seperti pegawai yang mengikuti tugas belajar, untuk mengikuti pelatihan teknis, kepemimpinan dan fungsional serta untuk promosi jabatan. Selai itu menggunakan capaian kinerja untuk pemberian reward dan punishment, melalui pemberian penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dimana tingkat persentase TPP yang didapat seorang pegawai diukur dari kinerja yang dicapainya setiap bulan.
8. Menerapkan E-Government untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan transaksional dengan menerbitkan Peraturan daerah nomor 2 Tahun tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman dan untuk memberikan kepastian hukum penerapan E-Government Kabupaten Barito Kuala.
9. Menerapkan system integritas dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) dan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

10. Menerapkan pemberian Reward dan Punishment, kompensasi pelayanan, menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dengan membuat rencana aksi perbaikan dan mempublikasikan hasil survey kepuasan kepada masyarakat .
11. Mendorong unit kerja pelayanan yang melayani kependudukan dan pencatatan sipil, perizinan, kesehatan, pajak dan retribusi serta mengusulkan 2 kecamatan yang menjadi zona integritas dan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/164/Kum/2020 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diusulkan sebagai wilayah bebeas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan untuk meningkatkan peran Inspektorat dalam mengawal pembangunan zona integritas, telah dibentuk Tim Pembina dan Penilai zona integritas yang melibatkan Inspektorat secara penuh mulai dari pembinaan, sosialisasi dan penilaian zona integritas.

Indikator Kinerja Ketiga Belas

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebuah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh satuan/unit pelayanan selama satu tahun melalui metode survey. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 telah melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat di 48 satuan/unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Hasil survey menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada indeks 84,00, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,99. Rendahnya capaian tersebut disebabkan :

1. Belum terdapatnya informasi standar pelayanan pada unit kerja.
2. Belum ditampilkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan yang diberikan.
3. Sarana dan prasarana layanan yang belum optimal, seperti belum tersedianya ruang pelayanan satu pintu.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarkat, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan pada setiap unit pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai media.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik pada setiap unit

pelayanan.

Indikator Kinerja Keempat Belas

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN

Terkait dengan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanan SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB diperoleh nilai sebesar 67,61 dari target 76,55 atau mencapai 88,32% dengan predikat B.

Namun demikian, di tengah keterbatasan waktu dan kondisi yang ada, kami terus berupaya melakukan upaya-upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Barito Kuala. Berikut kami sampaikan upaya-upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja sesuai rekomendasi hasil evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2020:

1. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi penerapan SAKIP Tahun 2020.
2. Melaksanakan Evaluasi dan perbaikan tujuan dan sasaran SKPD, melaksanakan evaluasi dan perbaikan Indikator Kinerja Eselon II, III, IV dan Pelaksana serta evaluasi perbaikan sinkronisasi program kegiatan dengan sasaran SKPD.
3. Melaksanakan evaluasi dan perbaikan Cascading SKPD.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap ketersediaan dokumen kolaborasi program prioritas Kabupaten Barito Kuala dan pelaksanaannya dengan SKPD.
5. Menerapkan E-Performance Budgeting, namun sampai saat ini yang baru diintegrasikan adalah dokumen perencanaan dengan anggaran.
6. Melaksanakan penginputan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan capaian kinerja SKPD pada aplikasi E-SAKIP Barito Kuala.
7. Memberikan Penghargaan untuk SKPD yan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja dengan kategori sangat baik.
8. APIP menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP berupa LHE dan LKE, dan APIP bersama Tim SAKIP Kabupaten Barito Kuala melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut SKPD atas rekomendasi evaluasi SAKIP tersebut.
9. Menyusun Laporan Kinerja yang isinya menyajikan analisis capaian target kinerja dan efisiensi anggaran penggunaan anggaran.

Sasaran 9.

MENINGKATNYA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Untuk melihat capaian sasaran tersebut, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan yaitu tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)

Indikator Kinerja Kelima Belas

TINGKAT PENYELESAIAN K3 (KETERTIBAN, KETENTERAMAN DAN KEINDAHAN)

Guna mendukung peningkatan capaian kinerja Tingkat penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban,Keindahan) dilaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan evaluasi, kemudiam kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah, dan pemberdayaan/pemungsian linmas untuk keamanan lingkungan dalam rangka menciptakan kondisi aman dan tertib.

Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Utama tingkat penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban,Keindahan) terealisasi sebesar 70,50% dari target 80,50 dengan capaian 87,57%. Lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 75,00. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan kantrantibmas dan belum optimalnya pencegahan tindak kriminal melalui kegiatan Penertiban PKL, Penertiban Perijinan, Penertiban jalur Hijau dan Penertiban Gepeng.

Gambaran capaian yang mendukung indikator penyelesaian K3 pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Kesatu, Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib tahun 2020 sebesar 43,86% dari target 68%, terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 99,53 %.

Adapun penyebab rendahnya capaian tersebut antara lain meliputi :

a. Tidak adanya Kotak Pengaduan
b. Data Perda dan Perkada tidak up to date
c. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten
d. Patroli dan Penertiban yang kurang dilaksanakan
e. Sarana dan Prasarana tidak mendukung
f. Terjadinya Pandemi COVID 19

g. Pengurangan Anggaran atau Refucosing Anggaran untuk COVID 19
h. Pengamanan Hari-Hari Besar dan Nasional tidak dapat dilaksanakan, karena kebijakan jaga jarak dan pembatasan kerumunan massa.

Upaya yang telah dilakukan meliputi :

a. Sosialisasi Perda dan Perkada sesuai dengan anggaran yang tersedia
b. Melakukan Patroli dan Pengawasan dalam rangka Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Wilayah Perbatasan Kab. Barito Kuala dengan Kab.Tapin, Perbatasan Kab. Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin, Perbatasan Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel dengan Kab.Kapuas Prov.Kalteng.

Kedua, jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, pada tahun 2020 sebanyak 134 kasus yang telah ditindaklanjuti, meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 sebanyak 75 kasus yang ditindaklanjuti. Pelanggaran tersebut meliputi penertiban PKL sebanyak 12 kasus yang telah ditindaklanjuti, jalur hijau 70 kasus, penertiban gepeng 18 kasus, larangan bulan Ramadhan 17 kasus, kawasan tanpa rokok 5 kasus, dan penertiban perizinan 12 kasus. Meningkatnya Jumlah pelanggaran Perda/Perkada antara lain :

a. Minimnya Informasi yang diberikan oleh aparat yang berwenang tentang larangan-larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat
c. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten
d. Satpol PP kurang dilibatkan dalam penyusunan Perda

Adapun upaya yang perlu diperhatikan ke depannya yaitu sebagai berikut :

a. Melakukan Penyelidikan Pelanggaran Perda dan Perkada
b. Pembinaan, Pengawasan terhadap pelanggar Perda dan Perkada

Mengikuti Rapat Koordinasi tentang Penyelesaian Pelanggar Perda dan Perkada.

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1) URUSAN PENDIDIKAN

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan Daerah kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
b. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar; dan
c. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pendidikan pada tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti tersaji pada Tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	WNI usia 5-6 tahun	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Dasar	WNI usia 7-15 tahun	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	WNI usia 7-18 tahun	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala tahun 2020

c) Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020, capaian SPM bidang urusan Pendidikan dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tersaji pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.16. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	63,42%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	95.60%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	32,70%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala tahun 2020

d) Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Barito Kuala pada perangkat daerah pelaksana SPM bidang Pendidikan pada program dan kegiatan dapat dilihat apda tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini	336.969.162	336.697.712	99,91
2	Pendidikan Dasar	5.240.368.738	4.589.207.163	98,22
3	Pendidikan Kesetaraan	477.716.440	407.628.440	92,7

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala tahun 2020

e) Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala didukung oleh seluruh ASN maupun Non-ASN Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti Korwil Pendidikan, BAPPELITBANG, Kontraktor-Konsultan Pembangunan, dsb.

f) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan pemenuhan SPM Dinas Pendidikan Kab. Barito Kuala diantaranya :

1. Ditemukannya penduduk Kabupaten Barito Kuala usia sekolah yang bersekolah diluar Kabupaten Barito Kuala yang tidak terdata sebagai peserta didik yang bersekolah.
2. Pendataan peserta didik miskin dan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terkendala Covid-19.
3. Pemotongan anggaran disebabkan Covid 19.

Solusi terkait permasalahan diatas diantaranya sebagai berikut :

1. Pendataan memanfaatkan sistem informasi yaitu (1) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), (2) Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan (3) *Education Management Information System* (EMIS), selanjutnya dilakukan identifikasi masyarakat yang tidak/belum terlayani bersekolah yaitu anak usia sekolah yang belum bersekolah *by name by address* (BNBA) dan dibuat daftarnya. Atas daftar masyarakat yang tidak/belum terlayani tersebut, selanjutnya dilakukan konfirmasi untuk menguji akurasi data dan/atau mengindentifikasi penyebab belum terlayani.
2. Melaksanakan pendataan dengan mengikuti protokol kesehatan.
3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam pemenuhan SPM.

2) URUSAN KESEHATAN

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang kesehatan di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

a. Ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Balita untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
e. Usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Penderita hipertensi untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
j. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

l. Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiencg Virusl untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeftciencg Virus).

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Kesehatan pada tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti tersaji pada Tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2.18 Target SPM Kabupaten Barito Kuala Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan	100%	Setiap Tahun

		skrining kesehatan sesuai standar		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala Tahun 2020

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) kabupaten/kota memiliki 12 jenis indikator pelayanan yang berhak diterima oleh masyarakat sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c) Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020, capaian SPM bidang Kesehatan dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tersaji pada tabel 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	69%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	78.13%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	88.58%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	57.93%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	85%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	4.42%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	41.87%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	21.31%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%	51.79%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	98%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus, yang bersifat	100%	75%

	peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.		

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala Tahun 2020

d) Alokasi Anggaran

Kegiatan capaian SPM bidang Kesehatan Tahun 2020 belum ada dana yang khususan untuk kegiatan tersebut, namun masih menggunakan dana yang bersumber dari DAU dan Dana DAK Non Fisik Tahun 2020 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.20 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	570.823.100	519.122.860	90,94 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	588.797.000	569.410.160	96,71 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	209.723.570	175.109.190	83,50 %
4	Pelayanan kesehatan balita	610.730.920	531.268.975	86,99 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	199.297.400	172.210.480	86,41 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	587.873.110	532.165.502	90,52 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	310.073.545	256.039.690	82,57 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	176.896.280	165.648.750	93,64 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	138.070.530	129.103.000	93,51 %
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	143.298.400	100.580.240	70,19 %

11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	161.095.220	152.700.230	94,79 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus, yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.	114.361.230	94.131.650	82,31 %

e) Dukungan Personil

Kegiatan Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Tahun 2020 ini adalah seluruh ASN maupun Non ASN Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (19 Puskesmas dan RSUD Setara).

f) Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuala untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan yaitu :

1) Belum adanya Sumber Daya Manusia/ Tim Khusus sebagai Penanggungjawab terhadap Pelaksanaan Perencanaan, Proses dan Evaluasi Pelaporan SPM Bidang Kesehatan;
2) Belum adanya evaluasi dan pengelompokkan dari berbagai kegiatan khusus untuk SPM Bidang Kesehatan; dan
3) Masih kurangnya sosialisasi Pelaksanaan Perencanaan, Proses dan Evaluasi Pelaporan SPM Bidang Kesehatan

- Solusi

Adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, yaitu :

1) Membentuk Tim sebagai Penanggungjawab terhadap Pelaksanaan Perencanaan, Proses dan Evaluasi Pelaporan SPM Bidang Kesehatan di Tahun 2021 dengan melibatkan ASN maupun Non ASN Dinkes dan Puskesmas Lingkung Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
2) Mengusahakan Pemanfaatan Sumber Dana yang ada untuk Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2021; dan
3) Mengikuti Pertemuan atau Pelatihan terkait Pelaksanaan Perencanaan, Proses dan Evaluasi Pelaporan SPM Bidang Kesehatan .

3) URUSAN PEKERJAAN UMUM

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota yang berada di dalam Peraturan Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum tahun 2020 di tetapkan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, seperti tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.21 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

c) Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020, capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tersaji pada tabel 2.22 sebagai berikut :

Tabel 2.22 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	63,32%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	100%	7,10%

d) Alokasi Anggaran

Anggaran yang tertata dalam Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala guna melaksanakan SPM urusan pekerjaan umum di Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.23 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	20.325.429.980	20.325.429.980	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	8.843.005.800	8.843.005.800	100

e) Dukungan Personil

Jumlah personil Dinas PUPR bidang Cipta Karya sebanyak 6 orang (masih kurang), baik tenaga teknis maupun non teknis sehingga perlu ada penambahan.

f) Permasalahan dan Solusi

Untuk APBD dari tahun 2017 hingga 2020 masih banyak terpakai untuk pekerjaan Relokasi perpipaan di sepanjang jalan handil bakti sehingga masih belum bisa optimal untuk pekerjaan pencapaian target pelayanan air minum ke masyarakat.

4) URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.24 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

c) Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020, capaian SPM bidang Perumahan Rakyat dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.25 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.	100%	0%

Capaian terhadap target SPM bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 yang telah ditetapkan bernilai 0% yang artinya tidak ada pelaksanaan jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat baik untuk program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

d) Alokasi Anggaran

Pada tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman tidak menganggarkan untuk pelaksanaan program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

e) Dukungan Personil

Dukungan personil pada pelaksanaan SPM bidan perumahan rakyat yaitu seluruh ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu sebanyak 19 orang.

f) Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan

1. Personil masih kurang
2. Gedung/kantor belum memadai
3. Kurangnya alokasi anggaran

-Solusi

1. Penambahan personil untuk DISPERKIM
2. Gedung baru sudah dibangun pada tahun 2020 namun belum bisa difungsikan
3. Penambahan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM

5) URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja – Pemadam Kebakaran dan BPBD. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah kabupaten terdiri atas:

a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
3. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.26 Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

c) Realisasi

Realisasi SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.27 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	84.6%
2	Pelayanan informasi rawan bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	0.003%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	0.0015%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi	100%	55.56%

		korban kebakaran		

d) Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Barito Kuala pada perangkat daerah pelaksana SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2.28 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi	Realisasi	%
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	Rp.686.432.100	Rp.672.891.333	98.03
2	Pelatihan keterampilan dan penanggulangan bencana	Rp.57,760,000.00	Rp.56,920,000.00	98.55
3	Tanggap darurat bencana alam	Rp.34,000,000.00	Rp.33,400,000.00	98.24
4	Sosialisasi mitigasi bencana dan pasca bencana	Rp.7,625,000.00	Rp.7,590,000.00	99.54
5	Pendataan dampak bencana	Rp.10,029,500.00	Rp.9,977,300.00	99.48
6	Pembentukan desa tangguh bencana	Rp.9,795,000.00	Rp.9,795,000.00	100
7	Penyediaan & Penyaluran logistik penanggulangan bencana	Rp.75,785,000.00	Rp.74,899,775.00	98.83
8	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	-	-	-

e) Dukungan Personil

Adapun dukungan personil/pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah:

1. SATPOL PP-DAMKAR :

- ASN Fungsional : 28 orang
- Tenaga Kontrak : 32 orang
- Tenaga Harian Lepas : 12 orang

2. BPBD : Seluruh ASN sebanyak 26 orang

f) Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan :

1. Terjadinya Pandemi COVID 19
2. Pengurangan Anggaran atau Refucosing Anggaran untuk COVID 19
3. Pengamanan Hari-Hari Besar dan Nasional tidak dapat dilaksanakan, karena kebijakan pemerintah untuk jaga jarak dan pembatasan kerumunan massa
4. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan SPM

- Solusi

Upaya yang telah dilakukan Satpol PP Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perda dan Perkada sesuai dengan Anggaran yang tersedia.
2. Melakukan Patroli dan Pengawasan dalam rangka Penanggulangan Penyebaran COVID 19 Wilayah Perbatasan Kab. Barito Kuala dengan Kab.Tapin, Perbatasan Kab. Barito Kuala dengan Kota Banjarmasin, Perbatasan Kab. Barito Kuala Prov. Kalsel dengan Kab. Kapuas Prov.Kalteng.
3. Penambahan anggaran untuk pelaksanaan SPM

6) URUSAN SOSIAL

a) Jenis Pelayanan Dasar

SPM bidang Sosial di Kabupaten Barito Kuala diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten terdiri atas:

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

1. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti;
2. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;
3. Lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di

dalam dan di luar panti;

4. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
5. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

b) Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Sosial pada tahun 2020 yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala seperti tersaji pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.29 Target SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

c) Realisasi

Realisasi SPM bidang Sosial pada tahun 2020 adalah sebagaimana tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.30 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	0%

2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	9,79%

d) Alokasi Anggaran

Total anggaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2020 sebesar Rp. 7.327.039.203,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.057.384.527,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.31 Komposisi Belanja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	5.080.394.413,00	4.838.117.506,00	97.99

2	Belanja Tidak Langsung	2.246.644.790,00	2.219.267.021,00	98.78
	Jumlah	7.327.039.203,00	7.057.384.527	

Adapun alokasi anggaran pada Dinas Sosial terkait pelaksanaan SPM bidang Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	34.750.000,00	10.000.000,00.	28,8
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	-	-	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	-	-	-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	3.332.251.819	3.254.024.000,00	97,65

e) Dukungan Personil

Dalam melaksanakan pencapaian SPM urusan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki 18 ASN, terdiri dari eselon II, eselon III, eselon IV dan staf.

f) Permasalahan Dan Solusi

- Permasalahan

Adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan :

1. Ketersediaan data awal/basis data penerima layanan SPM belum lengkap.
2. Kurangnya komitmen bersama dalam pelayanan SPM, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran.
3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) pelaksana SPM, saran dan prasarana dalam pelaksanaan SPM.

- Solusi

1. Perlu dilakukan pemetaan data awal penerimaan layanan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait.
2. Diwacanakan dan diharuskan, melaksanakan SPM wajib dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan SPM.

7) PROGRAM DAN KEGIATAN

a) Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Capaian Kegiatan	Fisik (%)	Keu. (%)	Indikator Program
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Persentase peserta didik penerima beasiswa/bantuan
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan	Jumlah peserta didik yang menerima bantuan SPM	100%	99.92%	

tenaga kependidikan				
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Persentase tenaga pendidik satuan pendidikan SD/SMP yang berkompeten
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik penerima bantuan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	100%	100%	
Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah pendidik satuan pendidikan SD/SMP yang mengikuti bimtek calon Kepala Sekolah, Jumlah pendidik satuan pendidikan SD/SMP yang mengikuti tes calon Kepala Sekolah, Jumlah pendidik satuan pendidikan SD/SMP yang mengikuti penguatan Kepala Sekolah	100%	96.94%	
Program Pendidikan Non Formal				Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PNF)

Penyelenggaraan Paket C setara SMA	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan UN Paket C setara SMU	100%	100%	
Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan UN Paket B setara SMP	100%	100%	
Program Pendidikan Anak Usia Dini				Persentase sarana dan prasarana satuan PAUD yang tersedia
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman/lapangan lembaga PAUD yang dibangun	100%	99.93%	
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah ruang kelas lembaga PAUD yang direhabilitasi	100%	99.95%	
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				Persentase sarana dan prasarana satuan pendidikan SD/SMP yang tersedia
Pembangunan gedung sekolah	Jumlah WC satuan pendidikan SD/SMP yang dibangun	100%	99.84%	

Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan SD/SMP yang dibangun	100%	96.19%	
Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman/lapangan satuan pendidikan SD/SMP yang dibangun	100%	99.72%	
Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah pengadaan mebeluer satuan pendidikan SD/SMP	100%	92.53%	
Rehabiltasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas satuan pendidikan SD/SMP yang direhabilitasi	100%	99.94%	
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan satuan pendiidkan SD/SMP yang direhabilitasi	100%	98.91%	

b) Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2020

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran/Pagu (Rp)	REALISASI	%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	52.136.710	49.805.050	95,53
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	56.366.270	41.899.000	74,33
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	2.463.966.000	2.416.296.192	98,07
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (CHT)	1.783.408.455	861.051.551	48,28
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Penugasan)	68.250.000	66.000.000	96,70
Program Upaya Kesehatan Masyarakat			
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	3.068.932.180	2.161.509.500	70,43
Peningkatan kesehatan masyarakat	422.032.131	397.524.569	94,19
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	66.000	66.000	100,00
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	54.834.303	54.546.106	99,47
Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	1.017.454.787	878.785.450	86,37
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	4.746.728.000	4.394.975.553	92,59
Jaminan Kesehatan Daerah	14.318.850.000	14.189.896.500	99,10
Jaminan Pelayanan BPJS Kesehatan (Kapitasi)	8.990.751.579	8.150.818.590	90,66
Peningkatan kesehatan masyarakat (DAK Non Fisik)	25.129.162.365	22.391.927.806	89,11
Jaminan Kesehatan Daerah (DAK Non Fisik)	2.859.713.000	2.129.815.180	74,48
Peningkatan kesehatan masyarakat	23.448.580	21.672.426	92,43
Peningkatan pelayanan kesehatan public safety center (PSC)	142.055.725	140.297.747	98,76
Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	7.536.035	7.527.285	99,88
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	32.485.620	27.323.400	84,11
Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya	9.764.943	9.751.000	99,86
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia			
Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	39.947.000	34.010.000	85,14
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	44.499.456	44.473.956	99,94
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	27.919.500	25.769.500	92,30
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	9.920.000	9.920.000	100,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	57.368.580	57.368.580	100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat			
Pemberian tambahan makanan dan vitamin	49.397.495	49.141.472	99,48
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	3.879.725	3.877.150	99,93
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	26.952.525	26.949.600	99,99
Program Pengembangan Lingkungan Sehat			
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat (DID)	22.889.690	22.879.500	99,96
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	75.000.000	27.348.780	36,47
Peningkatan imuniasasi	24.526.585	24.526.385	100,00
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	21.305.380	19.685.060	92,39
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (DID)	186.414.000	140.739.490	75,50
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	43.024.730	42.057.805	97,75
Peningkatan imuniasasi	11.185.900	11.110.900	99,33
Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	106.545.130	106.545.080	100,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
Penyusunan standar pelayanan kesehatan	52.485.562	47.448.696	90,40
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	36.505.000	33.985.000	93,10
Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)	1.582.980.000	1.024.365.830	64,71
Penyusunan standar pelayanan kesehatan	17.010.000	16.912.220	99,43
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin			
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	117.371.468	111.407.911	94,92
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata			
Pembangunan rumah sakit	3.133.575.753	2.708.329.063	86,43
Pengadaan obat-obatan rumah sakit	198.951.923	140.444.195	70,59
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	12.500.000	12.444.750	99,56
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	11.888.495	11.768.070	98,99
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			
Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	43.209.920	43.180.641	99,93
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			
Pelayanan pemeliharaan kesehatan	19.806.180	19.781.075	99,87
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	10.164.725	10.164.300	100,00
Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu (CHT)	22.815.575	22.450.800	98,40
Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			
Kegiatan peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan	1.868.791.000	1.483.515.393	79,38
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular			
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	75.128.420	63.028.420	83,89
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	64.875.430	64.795.230	99,88
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (CHT)	99.999.740	99.999.740	100,00
Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Perencanaan dan Pembinaan SDM Kesehatan	120.692.810	34.924.340	28,94
Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan (CHT)	90.325.835	32.918.700	36,44

c) Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.35 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

	Program/kegiatan	Jumlah Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi	%

1	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAA N AIR MINUM DAN AIRLIMBAH			
1.1	Pengembangan sistem distribusi air minum	9.343.393.300	8.260.114.600	88,41
1.2	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)	11.872.890.000	11.839.223.880	99,72
1.3	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Penugasan)	-	-	-
2	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN			
2.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	235.504.400	226.091.500	96,00
3	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN			
3.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan	235.504.400	226.091.500	96,00

d) Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat baik untuk program penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun program fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota karena tidak adanya anggaran untuk program tersebut.

e) Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja pagu anggaran Rp. 584.941.000,realisasi Rp. 582.534.925 atau 99,59%
- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah pagu anggaran Rp. 19.132.000 realisasi Rp. 19.132.000,00 atau 100%
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pagu anggaran Rp. 31.621.900 realisasi Rp. 31.477.325, atau 99,54 %

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengendalian keamanan lingkungan pagu anggaran Rp.11.628.000, realisasi Rp.900.000 atau 7,74 %

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

- Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pagu anggaran Rp.39.109.200 realisasi Rp.38.847.083, atau 99,33 %

4. Program Penanggulangan Kebakaran
    - Pelatihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran pagu anggaran Rp. 65.606.200 realisasi Rp. 64.298.200, atau 98,01%

f) Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36 Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Capaian Kegiatan	Fisik (%)	Keu. (%)	Indikator Program
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		**87,10**	**57,03**	**Meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas**
Peningkatan kualitas pelayanan sarana & prasarana rehabilitasi	Terlaksananya pelayanan bagi lanjut usia miskin dan	87,10	57,03	

Program dan Kegiatan	Capaian Kegiatan	Fisik (%)	Keu. (%)	Indikator Program
kesejahteraan sosial bagi PMKS	penyandang disabilitas			
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR		**96,75**	**92,74**	**Meningkatnya pelayanan dan Kesejahteraan sosial bagi Anak Terlantar**
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Terlaksananya pelayanan, pemberian pengetahuan dan ketrampilan berusaha bagi anak terlantar berbasis panti	98,50	96,86	
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha anak terlantar secara mandiri	95,00	90,22	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**99,04**	**97,65**	**Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan sosial bagi korban bencana**
Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Jumlah paket bantuan yang diberikan kepada korban bencana sosial (200 Paket). Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang memperoleh sertifikasi (8 orang)l	99,04	97,65	

2.2.5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, terdapat 14

(empat belas) indikator kinerja daerah yang harus dicapai selama periodesasi RPJMD tersebut. Indikator-indikator tersebut adalah (1) persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan, (2) persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan, (3) indeks kualitas lingkungan, (4) Angka Harapan Hidup, (5) Angka Harapan Lama Sekolah, (6) tingkat kemiskinan, (7) tingkat pengangguran, (8) pertumbuhan sektor pertanian, (9) PDRB per kapita, (10) indeks gini, (11) penigkatan PAD, (12) indeks reformasi birokrasi, (13) indeks kepuasan masyarakat, (14) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan (15) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketenteraman, Ketertiban, dan Keindahan).

Mengingat masing-masing indikator kinerja daerah tersebut memiliki derivat (turunan) yang tergambar dalam setiap indikator program perangkat daaerah. Dengan demikian, capaian program perangkat daerah akan berdampak terhadap tingkat capaian indikator daerah mengingat setiap program terpilih harus mendukung terhadap capaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan.

Tahun 2020 dan 2021 kapasitas anggaran pemerintah daerah mengalami kontraksi yang signifikan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan refocusing juga berdampak terhadap pengurangan belanja non kesehatan menjadi belanja bidang kesehatan. Beberapa kegiatan fisik melalui belanja modal banyak yang mengalami pengurangan bahkan dihilangkan untuk memenuhi amanah peraturan perundang-undangan yang terbit dan ditetapkan dalam rangka mengatasi dampak Covid-19. Hal ini sudah barang tentu berdampak terhadap alokasi anggaran untuk merealisasikan target kinerja program tahun 2021 bahkan mungkin tahun 2022 yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2022, merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2017-2022, sehingga jika terdapat relatif banyak program perangkat daerah yang tidak mencapai target, maka akan berdampak terhadap semakin besar target kinerja yang harus direalisasikan tahun 2022 dengan kebutuhan anggaran yang lebih besar pula.

2.2.6. Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.

Pentingnya kebijakan anggaran yang memegang prinsip efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kegiatan menjadi pemerintahan baik (*good* governance) yang berorientasi hasil, maka perencanaan dan penganggaran tahun 2022, penting untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Program dan kegiatan prioritas telah merumuskan tujuan dan sasaran prioritas yang jelas (*outcome*), sehingga setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat;

b. Menetapkan ukuran kinerja (*performance indicator*) yakni indikator kinerja yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dalam kerangka waktu tertentu. Program-program prioritas dengan tingkat capaian yang belum memadai akan dipacu dengan mengalokasikan anggaran yang memadai agar tercapai target kinerja program sesuai dengan rencana;

c. Setiap indikator kinerja, harus disertai dengan target kinerja yang jelas yang dapat ukur tingkat keberhasilannya pada saat dilakukan evaluasi atau pengukuran kinerja yang dicapai;

d. Memastikan bahwa antara tujuan dan program kegiatan terpilih benar-benar memiliki keterkaitan (*program follow result*) sehingga tidak terjadi pemilihan program dan kegiatan yang hanya melengkapi kerja yang berdampak pada pemborosan anggaran.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Pada sub bagian ini akan diuraikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merealisasikan sejumlah sasaran dan terget kinerja, baik yang berkenaan dengan tingkat capaian prioritas dan sasaran prioritas sesuai dengan indikator dan target kinerja daerah maupun yang berkenaan dengan pelaksanaan beberapa urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tentunya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintah daerah.

Kabupaten Batola sudah mengalokasikan ketentuan mandatory spending dalam tata
kelola keuangan pemerintah daerah meliputi :

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (duapuluh persen) dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
b. Alokasi anggaran kesehatan dari APBD 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
c. Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan yaitu 1,00% (satu persen) dari total belanja APBD untuk daerah yang APBD nya sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), sesuai Permendagri Pedoman Penyusunan APBD.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, tentunya sesuai dengan prioritas yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dimana prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya konektivitas dan ketersediaan infrastruktur.
   1) Tingginya unit cost pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan berakibat pada belum optimalnya besaran output pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa.
   2) Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk disamping kebutuhan orientasi bisnis property yang semakin berkembang.
   3) Masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana atau utilitas lainnya.
b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
   1) Barito kuala merupakan daerah yang memiliki resiko cukup tinggi terhadap terjadinya bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah).
   2) Kualitas air Sungai Barito sebagai pemasok air baku saat ini berada di bawah standar baku mutu air akibat pencemaran di beberapa tempat.
   3) Upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) belum dilaksanakan secara optimal.

c. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi
   1) Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Selatan, akan berakibat terhadap semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan pangan terutama terhadap bahan pangan pokok.
   2) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum mengoptimalkan perdagangan produk olahan berbahan baku lokal.
   3) Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan terhadap perolehan PDRB dalam perekonomian Barito Kuala. Sementara PDRB yang bergantung pada sektor primer (usaha hulu) tanpa pengembangan sektor skunder (usaha hilir) berakibat terhadap akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

d. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia

1) Capaian pembangunan yang tergambar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
2) Capaian indikator makro Usia Harapan Hidup berada pada peringkat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
3) Rata-rata lama sekolah berada pada peringkat 10 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
4) Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi terutama pencemaran air. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Barito Kuala.

e. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum.

1) Kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap lembaga yang memberikan pelayanan terutama pendidikan dan kesehatan.
2) Belum optimalnya pelaksanaan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yakni urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yag tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pencapaian target-target pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tersebut, antara lain adalah :

a. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02 point dibandingkan dengan tahun 2019 dan Barito Kuala berada pada peringkat 12 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari komponen yang membentuk IPM yakni Usia Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per kapita, maka secara spesifik penurunan terjadi pada komponen Pengeluaran per Kapita.
b. Akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi infrastruktur dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusia yang masih perlu untuk ditingkatkan, termasuk belum meratanya distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan antar wilayah di Barito Kuala.
c. Produktivitas pertanian masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang sama-sama memiliki areal pertanian. Meskipun secara produksi Barito Kuala merupakan sentra pangan di Kalimantan Selatan yang dicapai dari luasan pertanian yang mendominasi di Kalimantan Selatan, namun masih perlu ditingkatkan usaha intensifikasi guna peningkatan produktivitasnya.
d. Masih rendahnya jumlah UMKM dan IKM di Barito Kuala sehingga belum memberikan peran yang signifikan terhadap aktivitas perekonomian di Barito Kuala.
e. Masih rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan yang diperlukan oleh pangsa kerja. Saat ini tenaga kerja yang ada mayoritas adalah tenaga kerja pada sektor pertanian.
f. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, hal ini terbukti dari hasil evauasi Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan bahwa Barito Kuala menjadi peringkat pertama tertinggi untuk Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kalimantan Selatan.

2.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk sasaran dan prioritas pembangunan daerah kabupaten barito kuala tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran form 1 yaitu keselarasan anatara prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022.

Sedangkan untuk keselarasan prioritas pembangunan kabupaten barito kuala tahun 2022 dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran form 4.

2.5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Untuk Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan RPJMD 2017-2022 telah menyusun rencana kerja dan pendanaan daerah. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran form 2 dan form 3.

2.6 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah. Adapun Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Target Tahun 2022	%
			Target	Realisasi			
1.	Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan	Persen	65	51,96	79,93	75	69,28
2.	Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan	Persen	55	45,92	83,49	75	61,22
3.	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	51,01	54,13	106,11	51,52	105,06
4.	Persentase pertumbuhan sektor pertanian	Persen	1,82	(1,97)	(1,08)	1,93	(1.02)
5.	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,27	122,85	0,32	115,62
6.	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	25,25	27,47	108,79	27,47	100
7.	Peningkatan PAD	Persen	15,60	167,96	1.076,66	17,80	105,97

8.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	12,63	12,39	98,09	12,99	95,38
9.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	65,83	66,09	100,39	66,29	99,69
10.	Tingkat Pengangguran	Persen	0,87	2,91	(134,48)	0,65	(247,69)
11.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,82	4,51	106,43	4,25	93,88
12.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	59,62	91,72	80	74.52
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	95	84,15	88,57	95	88,57
14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	73,55	67,00	91,09	78,25	85,62
15.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Persen	80,50	70,50	87,57	100	70,50

3. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai**

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.38 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Misi 1				
1	***Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman***	2	81,71	89,47	-7,76
2	***Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan***	1	106,11	85,05	21,06
	Misi 2				
3	***Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian***	1	(1,08)	76,58	-77,66
4	***Meningkatnya Produksi Pelaku Usaha Dan Tingkat Produktivitas Ekonomi Masyarakat***	2	102,96	86,24	16,72
5	***Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi local***	1	1.076,66	78,11	998,55
	Misi 3				
6	***Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat***	2	99,24	93,24	6
7	***Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat***	2	68,38	83,14	-14.76
	Misi 4				
8	***Meningkatnya akuntabilitas***	3	83,54	80,32	3.22

	penyelenggaraan pemerintahan				
9	***Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat***	1	87,57	82,98	4.59

III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi Barito Kuala tahun 2022, akan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 yang lalu. Dengan demikian diharapkan arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi daerah tahun 2022 seluruhnya dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat, peningkatan daya beli dan pemulihan kondisi ekonomi secara terencana, sistematis dan terarah dengan indikator dan target kinerja terukur yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan termasuk Perangkat Daerah yang mengampu bidang ekonomi. Adapun arah kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil;
b. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah dan daya saing daerah;
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
d. Peningkatan dan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan perkotaan;
e. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan berbasis agribisnis, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial;
f. Peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha diperdesaan;
g. Pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat, pengembangan produk unggulan agribisnis dan UMKM;

h. Peningkatkan investasi yang masuk ke daerah yang ramah lingkungan dan mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha;
i. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan dinamika kebijakan keuangan nasional yang berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah terutama yang berkenaan dengan pos pendapatan daerah dari dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, DID dan pos dana transfer lainnya, maka kebijakan pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD penghasil PAD;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara pusat – daerah untuk pengelolaan Dana Perimbangan dan Non Perimbangan;
4. Meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi;
5. Mengoptimalkan pengelolaan aset secara profesional;
6. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
7. Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut (pajak/retribusi) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat .

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Guna alokasi anggaran dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, belanja daerah tahun 2022 akan diprioritaskan pada belanja wajib dan mendesak serta untuk memenuhi target kinerja yang masih tersisa. Oleh karena itu kebijakan belanja tahun 2022 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilihan program perangkat daerah sesuai dengan program terpilih pada dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

2. Fokus pada program/kegiatan pembangunan wajib dan mendesak seperti penyelesaian beberapa ruas jalan strategis yang menghubungkan antar wilayah dengan permasalahan dan potensi yang memerlukan intervensi pembangunan guna meningkatkan perkembangan wilayah Pembangunan secara konprehensif.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kecamatan termasuk pembangunan infrastruktur fisik RSUD. Setara.
4. Penyelesaian Program Prioritas Bedah Kampung Terintegrasi dan belanja prioritas mendesak lainnya;
5. Memenuhi *mandatory budget* Urusan Pendidikan (20%), Urusan Kesehatan (10%), infrastruktur (25%), dan Inspektorat (1%);
6. Melakukan refocusing belanja SKPD untuk memprioritaskan penyelesaian kinerja tersisa tahun 2022
7. Belanja daerah juga akan dialokasikan untuk revitalisasi pembangunan bidang kesehatan dan bidang pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat sehingga dampak Pandemi Covid-19 dapat segera diatasi dan kondisi kesehatan dan aktivitas pendidikan dapat berjalan secara baik.

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80.614.386.027,72	74.329.113.456,21	61.479.136.515,00	-	-
1.1.1	Pajak daerah	32.397.336.901,00	23.083.486.101,99	20.374.028.000,00		
1.1.2	Retrubusi daerah	4.157.497.278,72	3.889.140.784,00	5.295.979.515,00		
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.148.443.396,00	6.397.613.132,00	6.550.000.000,00		
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	39.911.108.452,00	40.958.873.438,22	29.259.129.000,00		
1.2	Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer Pusat	903.413.397.440,00	949.637.060.600,00	1.144.853.570.000,00	-	-
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	124.471.234.848,00	181.082.552.390,00			
	Pendapatan transfer pemerintah pusat	-	-	1.076.803.570.000,00		
	Pendapatan transfer antar daerah	-	-	68.050.000.000,00		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	593.083.399.000,00	532.810.524.000,00			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.858.763.592,00	235.743.984.210,00			
1.2.4	Dana Insentif Daerah	-	-			
1.2.5	Dana Desa	-	-			
1.2.6	Pendapatan bagi hasil bantuan keuangan	-	-			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	306.421.589.855,00	192.863.889.223,00	47.439.898.768,00	-	-
1.3.1	Hibah	46.277.075.475,00	61.806.120.673,00	9.389.846.208,00		
1.3.2	Dana darurat	-	-			
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	38.050.052.560,00		
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	86.242.022.504,00	70.690.191.550,00			
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	21.461.681.000,00	60.367.577.000,00			
1.3.5	Pendapatan lainnya	152.440.810.876,00				
	Jumlah	**1.290.449.373.322,72**	**1.216.830.063.279,21**	**1.253.772.605.283,00**	-	-

Tabel 3.2. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
2.1	**Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi**	**723.030.378.767,00**	**679.720.643.221,00**	**1.059.361.741.372,00**	-	-
2.1.1	Belanja pegawai	473.802.000.502,00	527.612.371.212,00	540.222.399.888,00		
2.1.2	Belanja bunga	-		17.248.831.270,00		
2.1.3	Belanja subsidi	-				
2.1.4	Belanja hibah	12.272.580.100,00	11.305.269.190,00			
2.1.5	Belanja bantuan sosial	4.906.675.000,00	2.662.187.500,00			
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	2.444.817.350,00	2.607.060.646,00	2.567.000.800,00		
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	229.490.305.815,00	69.359.683.700,00	218.303.605.300,00		
2.1.8	Belanja tak terduga	114.000.000,00	66.174.070.973,00	2.300.000.000,00		
	Belanja barang dan jasa	-	-	275.813.690.761,00		
	Belanja bantuan sosial	-	-	2.906.213.353,00		
2.2	**Belanja Langsung/Belanja Modal**	**588.854.725.637,00**	**534.508.750.592,00**	**212.310.863.911,00**	-	-
2.2.1	Belanja pegawai	16.608.465.992,00	15.928.324.494,00			
2.2.2	Belanja barang dan jasa	294.547.925.740,00	259.365.130.009,00			
2.2.3	Belanja modal	277.698.333.905,00	259.215.296.089,00			
	Belanja modal tanah	-	-	600.000.000,00		
	Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	37.699.815.387,00		
	Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	57.930.472.619,00		
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	-	-	113.497.990.344,00		
	Belanja modal aset tetap lainnya	-	-	2.582.585.561,00		
	Jumlah	**1.311.885.104.404,00**	**1.214.229.393.813,00**	**1.271.672.605.283,00**	-	-

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiyanaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 s/d 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022	Proyeksi/Target Tahun 2023
3.1	**Penerimaan Pembiyanaan**	**165.539.613.677,65**	**138.937.123.995,56**	**33.000.000.000,00**	**-**	**-**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	155.938.025.577,65	129.832.527.595,56	25.000.000.000,00		
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	9.601.588.100,00	9.104.596.400,00	8.000.000.000,00		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-			
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**14.271.355.000,00**	**22.755.391.100,00**	**15.100.000.000,00**	**-**	**-**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-			
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	6.000.000.000,00	14.600.000.000,00	7.100.000.000,00		
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-			
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	8.271.355.000,00	8.155.391.100,00	8.000.000.000,00		

IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional (RPJMN 2020 – 2024)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumberdaya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Sasaran, target dan indikator RPJMN 2020 – 2024 dijabarkan ke dalam beberapa agenda pembangunan sebagai berikut :

a. Agenda 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran :
    1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangungan ekonomi yang berkelanjutan
        a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);

b) Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian:
a) Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
b) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
c) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
d) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;

b. Agenda 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum, terdiri dari :
a) Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa); Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
b) Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; dan
c) Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah

c. Agenda 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan;
2) Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
3) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
4) Peningkatan produktivitas dan daya saing;

d. Agenda 4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, dan ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2) Meningkatnya kerukunan dan harmoni sosial kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama.
3) Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga, yang ditandai dengan Indeks Pembangunan Keluarga dari 50,03 pada tahun 2020 menjadi 54,03 tahun 2024, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan dari 21,8 (SDK 2017), menjadi 22,1 pada 2024 serta angka perceraian yang terus menurun sampai 2024.

e. Agenda 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagaimana tabel berikut :
1) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi, yang terdiri dari :
a) Meningaktnya konektivitas nasional;
b) Meningkatnya indeks pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
c) Meningkatnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya air ;
d) Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga ;
e) Terpenuhinya kebutuhan energi nasional.
2) Inftastruktur pelayanan dasar :
a) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
b) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
c) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi;

f. Agenda 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2) Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim;
3) Meningkatnya keberhasilan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon.

g. Agenda 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran sebagai berikut :

1) Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif;
2) Menguatnya wawasan kebangsaan;
3) Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil;
4) Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif;
5) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebsan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dn terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Selatan (2016 – 2020)

Mengingat periodesasi pembangunan jangka menengah Kalimantan Selatan berada pada tahun transisi perencanaan, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan mengacu pada RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan adalah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia;
b. Tata kelola pemerintahan yang baik;
c. Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal;
e. Meningkatkan Kehidupan kualitas masyarakat berbudaya lokal;
f. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang;
g. Meningkatkan daya saing perekonomian;

Sedangkan sasaran pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja;
d. Meningkatnya pemahaman keagamaan;
e. Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender;
f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

g. Meningkatnya pendanaan daerah;
h. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah;
i. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
j. Meningkatnya ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
k. Mempersiapkan terselenggaranya PON di Kalsel;
l. Meningkatkan ketahanan budaya;
m. Meningkatnya etos kerja, moralitas, sikap, disiplin, kreativitas dan kepedulian;
n. Meningkatnya kerukunan umat beragama;
o. Meningkatnya kualitas budaya masyarakat;
p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar;
q. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian;
r. Terwujudnya mandiri pangan dan kontribusi sektor pertanian;
s. Meningkatnya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa;
t. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
u. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah;

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Barito Kuala (RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022)

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No. 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahuin 2021–2022, disebutkan bahwa tujuan pembangunan Barito Kuala adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya;
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
b. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan;
c. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian;
d. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat;
e. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal;
f. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
g. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat;
h. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika;
i. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, telah menentukan tema dan prioritas pembangunan tahun 2022 yang akan datang. Adapun tema RKP Tahun 2022 adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**" yang akan dicapai melalui 7 Prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022. Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan berdasarkan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah **"Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan memperhatikan Lingkungan".** Pembangunan di Kalimantan Selatan akan difokuskan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yakni :

a. Hilirisasi industri, peningkatan sektor pertanian dan pariwisata;
b. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
c. Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian;
d. Tata kelola pemerintahan yang baik;
e. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat mitigasi ketahanan bencana.
f. Kalsel sebagai gerbang dari *food estate* dan Ibu Kota Negara Baru.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa perencanaan di daerah merupakan bagian yang integral dari perencanaan nasional, maka penentuan prioritas pembangunan daerah adalah dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, akan terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 mengambil Tema RKPD "**Pemulihan Ekonomi dan Pemerataan Pelayanan".** Sedangkan prioritas dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2022 yang telah ditetapkan disajikan dari 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana publik yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah strategis, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
    1) Meningkatnya lahan pertanian yang berigasi;
    2) Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap;
    3) Meningkatnya cakupan pelayanan air minum;
    4) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang layak;
    5) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;

6) Meningkatnya layanan telekomunikasi;
7) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan dan publik;
8) Meningkatnya pengelolaan Sanitasi;

b. Sinergisitas pelayanan publik bagi terciptanya pemantapan dan pemerataan akses pelayanan, dengan sasaran prioritas, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan akses pelayanan pendidikan;
   2) Meningkatkan sarana prasarana dan akses pelayanan kesehatan;
   3) Menurunnya angka kemiskinan;
   4) Menurunnya angka pengangguran.

d. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan persampahan;
   2) Meningkatnya kualitas air dan udara;
   3) Meningkatnya tutupan lahan.

e. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha guna tercapainya produktivitas dan hilirisasi produk pertanian secara luas dan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, dengan sasaran prioritas sebagai berikut :
   1) Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
   2) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat;
   3) Terciptanya hilirisasi produk usaha masyarakat melalui kemudahan akses saprodi dan pemasaran.

Tabel 4.1. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Prioritas RKPD Prov. Kalsel Tahun 2022	Prioritas RKP Tahun 2022
1	2	3
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana publik yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah strategis	- Memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonimian	- Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
2. Sinergisitas pelayanan publik bagi terciptanya pemantapan dan pemerataan akses pelayanan	- Tata kelola pemerintahan yang baik	- Penyederahaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penyederhaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. - Penyederhaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan undang-undang cipta kerja

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	- Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	- Pembangunan Sumber Daya Manusia dan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global
4. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat mitigasi ketahanan bencana	-
5. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha guna tercapainya produktivitas dan hilirisasi produk pertanian secara luas dan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat	- Kalsel sebagai gerbang dari food estate dan Ibu Kota Negar Baru. - Hilirisasi industri, peningkatan sektor pertanian dan pariwisata	- Transformasi Ekonomi, Melakukan Transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyar Indonesia

Tabel 4.2. Prioritas, Sasaran Prioritas, Program Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana publik yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan wilayah strategis	Meningkatnya lahan pertanian yang berigasi;	Program peningkatan kualitas dan tatakelola jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengelolaan sumber daya air
			Dinas Pertanian TPH	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
	Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi mantap;	Program rehabilitrasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang	Program penyelenggaraan jalan
	Program peningkatan akses air minum masyarakat		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
	Program pencegahan dan penanggulangan kawasan perumahan dan permukiman kumuh		Dinas Perhubungan	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan permukiman
	Program peningkatan kualitas layanan telekomunikasi publik		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
	Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pemerintah dan pemebrdayaan masyarakat		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program aplikasi informatika
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan dan publik;		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program penataan bangunan dan gedung

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
	Meningkatnya pengelolaan Sanitasi;	Program peningkatan cakupan layanan sanitasi berbasis masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengelolaan dan pengembangan siste air imbah
			Dinas Kesehatan	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program peningkatan kerjasama desa
2. Sinergisitas pelayanan publik bagi terciptanya pemantapan dan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Program peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik	Dinas Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
pemerataan akses pelayanan				Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program pendaftaran penduduk
			Bappelitbang	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program pelayanan penanaman modal
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Program pengelolaan keuangan daerah

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Rumah Sakit Umum Daerah	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Sekretariat Daerah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Dinas Pertanian TPH	Program penyuluhan pertanian
			DPPKBP3A	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Dinas Perkebunan dan Peternakan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program pengawasan keamanan pangan
			Sekretarian DPRD	Program pendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan
			BPBD	Program penanggulangan bencana
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Badan Kesbangpol	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
			Badan Kepegawaian dan Diklat	Program pengembangan sumber daya manusia
			Kecamatan	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat guna peningkatan dan pemerataan kesejahteraan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan akses pelayanan pendidikan.	Program peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan	Dians Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
			Dinas Perpusip	Program pembinaan perpustakaan
	Meningkatkan sarana prasarana dan askes pelayanan kesehatan	Program peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			Rumah Sakit Umum Daerah	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Menurunnya angka kemiskinan.	Program peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
			Disporabudpar	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
				dan program pemasaran pariwisata
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program peningkatan kerja sama desa
	Menurunnya angka pengangguran.	Program penciptaan lapangan kerja bagi tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan Kepegawaian dan Diklat	Program pengembangan sumber daya manusia
4. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan persampahan;	Program peningkatan pengelolaan persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
			Dinas Lingkungan Hidup	Program pengelolaan persampahan
	Meningkatnya kualitas air dan udara;	Program pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
				pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
	Meningkatnya tutupan lahan.	Program pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
5. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha guna tercapainya produktivitas dan hilirisasi produk pertanian secara luas dan dalam rangka	Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas;	Program peningkatan produksi pertanian dalam arti luas	Dians Pertanian TPH	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Dinas Perkebunan dan Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
	Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat;	Program pengembangan IKM dan UMKM	Dinas Kopperindag	Program perencanaan dan pembangunan industri

Prioritas RKPD Kabupaten Barito Kuala	Sasaran Prioritas	Program Prioritas Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Program Prioritas Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
pemulihan ekonomi masyarakat	Terciptanya hilirisasi produk usaha masyarakat melalui kemudahan akses saprodi dan pemasaran	Program diversifikasi produk olahan usaha ekonomi masyarakat	Dinas Kopperindag	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 1 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 ini.

Mengingat tahun 2022 merupakan tahun penyempurnaan kinerja pembangunan daerah, maka kerangka kerja pembangunan tahun tersebut akan difokuskan pada penyelesaian beberapa program dan kegiatan prioritas yang masin menyisakan target kinerja secara fisik yang belum tercapai, disamping beberapa program dan kegiatan prioritas yang karena berdasarkan dimensi waktu harus dikerjakan dan diselesaikan pada tahun 2022 yang akan datang.

Berdasarkan prioritas dan sasaran prioritas daerah tahun 2022 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2022 di Kabupaten Barito Kuala adalah sebegai barikut :

a. Program peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pada wilayah strategis, dengan kegiatan :
    1) Peningkatan kualitas ruas jalan Kutabamara (melanjutkan capaian kinerja tahun 2018 – 2021);
    2) Pembangunan kembali Jembatan Tanipah di Kecamatan Mandastana;
    3) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan pada sentra produksi ekonomi masyarakat.
b. Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan kegiatan :
    1) Penyelesaian pembangunan fisik kawasan *Jejangkit Ecopark*
    2) Penyelesaian pembangunan fisik kawasan Agropolitan Talaran Setara dan Kawasan Perdesaan Agropolitan;
    3) Rehabilitasi jaringan irigasi rawa.
c. Program peningkatan kualitas sararana dan prasarana kesehatan, dengan kegiatan :
    1) Pembangunan fisik RSUD Setara di Kec. Alalak;
    2) Rehabilitasi fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan.
d. Program Permata Bunda
e. Program Bedah Kampung Terintegrasi
f. Program Menata Kota

Disamping program prioritas daerah di atas, terdapat beberapa program prioritas perangkat daerah berdasarkan indikator dan target kinerja urusan masing-masing pada tahun 2022 yang telah disinkronkan dengan provinsi dan nasional melalui Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2021. Dalam rangka merealisasikan berbagai program dan kegiatan prioritas tersebut, diperlukan alokasi anggaran yang memadai dengan mempertimbangkan kakasitas keuangan daerah dan tingkat urgensi dari program dan kegiatan prioritas yang terpilih.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2022, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnhya bahwa menjadi perencanaan tahun rerakhir dari periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2017 – 2022. Ini berarti bahwa tahun 2022 merupakan tahun penyempurnaan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan target pembangunan jangka menengah.

VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan usuran pemerintahan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan indikator dan target kinerja yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, rewalistis dan dalam kerangka waktu tertentu.

Pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, tertera Visi Kabupaten Barito Kuala yakni "Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)" yang dicapai melalui 4 (empat) misi, 4 (empat) tujuan dan 9 (sembiulan) sasaran dengan 15 (lima belas indikator kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, kinerja Pemerintah Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni kinerja berdasarkan indikator makro pembangunan, kinerja berdasarkan RPJMD dan kinerja urusan yang diampu oleh peranhkat daerah. Adapun indikator dan target kinerja daerah tahun 2022 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1. Indikator dan target kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

a. Indikator Makro Pembangunan Tahun 2022

No	Indikator Makro	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,04	1,04	3,88
2	Rasio Gini	0,277	0,34 – 0,32	0,25
3	Angka Kemiskinan (%)	4,51	4,65 – 4,32	4,32
4	Angka Pengangguran (%)	2,93	0,75 – 0,85	2,50
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,22	66,53	67,11

b. Target Kinerja RPJMD Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
1	Meningkatnya infratsruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan di kawasan permukiman	Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan	51,96	75,00	75
		Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan	45,92	65,00	75
2	Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup	Indeks Kualiats Lingkungan Hidup	54,13	60,00	51,52
3	Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	Persentase pertumbuhan sektor pertanian	-1,97	1,85	1,93

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
4	Meningkathya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomimmasyarakat	Indeks Gini	0,28	0,33	0,32
		PDRD per kapita (juta rupiah)	27,47	26,73	27,47
5	Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potesi lokal	Peningkatan PAD (%)	167,96	16,70	17,80
6	Meningkatnya kualiats pendidikan dan derajat kesehatan amsyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,39	12,81	13,05
		Angka Harapan Hidup (tahun)	65,88	66,06	66,29
7	Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Angka pengangguran (%)	2,91	0,75	0,65
		Tingkat kemiskinan (%)	4,51	4,32	4,25
8	Meningkatnya akuntabilitas kienrja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Indeks Reformasi Birokrasi	Belum rilis	75,00	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum rilis	95,00	95,00
9	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Nilai SAKIP	.....	77,05	78,25
		Tingkat penyelesaian K3	35,85	100,00	100,00

c. Target Kinerja Urusan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
1	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**						
1.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	65.03	75.03	83.00	Dinas Pendidkikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan (%)	100	32.70	62.75	82.05	Dinas Pendidkikan
1.2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100			70.00	Dinas Pendidikan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100			32.72	Dinas Pendidikan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
2	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**						
2.1.	Meningkatnya kualitas tatakelola rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (Ratio TT:1000 penduduk)	1	0.35:1000	0.38:1000	0.42:1000	Dinas Kesehatan, RSUD
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	90	80	90	100	Dinas Kesehatan, RSUD
2.2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (%)	100	100	100	100	Dinas Kesehatan, RSUD
		Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (OGJ) berat (%)	100	70.19	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (%)	100	90.52	100	100	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (%)	100	75	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)	100	94.79	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia (%)	100	82.37	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	90.94	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu melahirkan (%)	100	96.71	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100	83.50	100	100	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100	86.99	100	100	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (%)	100	86.41	100	100	Dinas Kesehatan
2.3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)	100	18.4	21.1	18.4	Dinas Kesehatan
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	231	198	943	995	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205	9	10	10	Dinas Kesehatan
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15	122	100	80	Dinas Kesehatan
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90	198	943	995	Dinas Kesehatan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59	9/19	9/19	9/19	Dinas Kesehatan
2.4	Meningkatnya Efektivitas dan Cakupan Pengawasan Perizinan Berusaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	28.62	100	100	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
3.1	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	92.81	61,97	73,41	79,12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	73.7	87	90	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	23.54	43	44	45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	16.405.116	34.176	34.970	35.765	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan	69.27	17,28	18	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum	48.274.527	13.575	14.140	15.711	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		Bukan Jaringan Perpipaan					
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	79.43	74,7	84,12	92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	58.5	67,8	69,14	71,46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.3	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	54	67	70	72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	250.000	1.331	1.151,7	2.101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.4	Terpenuhinya penyelesaian rencana	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	125	0	1	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	tata ruang dan rencana detail tata ruang						
4	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**						
4.1	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	5779			4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.2	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	152510			2241	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.3	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	40000			1306	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
5.	**Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat**						
5.1	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	92.59	70	100	Satuan Polisi Pamong Praja
6.	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**						
6.1	Tersedianya Data Fakir Miskin	Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	300	1	1	1	Dinas Sosial
		Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	600	10	20	60	Dinas Sosial
		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	100	100	100	100	Dinas Sosial

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
6.2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	7000		4	15	Dinas Sosial
6.3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1,200	4	4	4	Dinas Sosial
7.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**						
7.1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	10	224.57	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.2	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85	123.46	100	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
8	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**						Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
8.1	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	8320000	9387.84	9354	9356	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya	20540000	10470	10575	10680	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**						
9.1	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000	128	154	288	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550	128	154	288	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
9.2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800	-	200	400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9.3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan Kualitas Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	19-20	15	18	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi						
9.4	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12	1	1	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	**Urusan Bidang Pemberdayaan**						

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	Perempuan dan Perlindungan Anak						
10.1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	75	0.204%	0.3%	0,4%	Dinas PPKBP3A
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.74	78.45%	78.55%	78.65%	Dinas PPKBP3A
10.2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69.87	-	600	650	Dinas PPKBP3A
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	100%	100%	100%	Dinas PPKBP3A
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian						

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	Penduduk dan Keluarga Berencana						
10.3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57.00	5040	5090	5140	Dinas PPKBP3A
10.4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21.00	53.98	52.98	51,98	Dinas PPKBP3A
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.00	11.63	12.21	9.66	Dinas PPKBP3A
11.	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**						
11.1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22	54.13	55.15	57	Dinas Lingkungan Hidup

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
11.2	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga	10	24	25	Dinas Lingkungan Hidup
12.	**Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
12.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97	33.74	66	89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa	100	15	99	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		kematian yang dilaporkan					
		Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100	27	72	87	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100	24	67	73	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
13.1	Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	3944	1	4	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
13.2	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkembang	7500	43	50	55	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**						
14.1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio konektivitas Nasional	0.695	41,1	45	45	Dinas Perhubungan
14.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi	78.44	33,33	50	50	Dinas Perhubungan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	85,00	-	72	75	Dinas Perhubungan
14.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan	28.85	0,0044	0,0045	0.0045	Dinas Perhubungan
15.	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,**						

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	Usaha Kecil dan Menengah						
15.1	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50	46	48	50	Dinas Kopperindag
15.2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	50	46	48	50	Dinas Kopperindag
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						Dinas Kopperindag
15.3	Meningkatnya Kinerja Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96 - 7.86	10.05	10.50	11.00	Dinas Kopperindag
15.4	Meningkatnya Keberdayaan dan Kepercayaan Konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91	75	80	85	Dinas Kopperindag
15.5	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida	Persentase kinerja realisasi pupuk	90	85	95	95	Dinas Kopperindag

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu, dan tempat						
16	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**						**Dinas Kopperindag**
16.1	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6.8	0.86	0.40	0.40	Dinas Kopperindag
16.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18.3	15.76	16.00	16.50	Dinas Kopperindag
16.1	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9	38.03	38.05	38.05	Dinas Kopperindag

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
16.2	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta	10649	11500	11500	Dinas Kopperindag
16.3	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun	0.21	0.25	0.25	Dinas Kopperindag
17.	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**						
17.1	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	968.4 triliun	250.000.000.000	250.000.000.000	250.000.000.000	Dinas PMPTSP
18.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olah Raga**						
18.1	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	12	1		1	Dinas Porabudpar

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
18.2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1.398.000.000.000		28.000.000	88000000	Dinas Porabudpar
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	260.000.000-280.000.000	69432	127938	160489	Dinas Porabudpar
19	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**						
19.1	Kelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	4,156	14	14	16	Dinas Porabudpar
19.2	Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dilindungi	4.156	14	14	16	Dinas Porabudpar
19.3	Terwujudnya revitalisasi dan	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai	63939	3000	3000	3000	Dinas Porabudpar

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	warisan budaya yang dipreservasi					
20.	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**						
20.1	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	80	75	85	95	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.2	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online	100	70	80	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online	65		55	65	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.3	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi	Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah daerah	55		50	55	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
	Masyarakat di bidang digital	yang mengikuti pelatihan dan pembinaan					
20.4	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	70	98.55	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	70	-	-	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
20.5	Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan Siber	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100		40	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	13			1	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	200			1	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.6	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	100		5	10	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
		perencanaan pembangunan daerah					
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		5	10	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**						
21.1	Meningkatnya produktivitas pertanian	persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	2 (padi dan jagung)	0,24 (Padi), 1,12 (Jagung), 1,16 (Kedelai	0,26 (Padi), 1,03(Jagung), 0.39 (Kedelai	0,26(Padi), 1,02 (Jagung), 0,78 (Kedelai)	Dinas pertanian TPH
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	1.2	0.99 (Jeruk), 5.49 (Nenas), 1.01 (Kueni Anjir), 20.34 (Cabai Rawit), 20.97 (Cabai Besar),	0.99 (Jeruk), 0.10 (Nenas), 0.99 (Kueni Anjir), 1.31 (Cabai Rawit), 1.01 (Cabai Besar),	0.99 (Jeruk), 0,10 (Nenas), 0,99 (Kueni Anjir), 1,27 (Cabai Rawit), 1,00 (Cabai Besar),	Dinas pertanian TPH

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
				6.62 (Bawang Merah)	3.40 (Bawang Merah)	0,54 (Bawang Merah)	
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3.28 (kelapa sawit, kakao, kopi, jambu mete, kelapa, karet, teh, aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, sereh wangi, vanili, tembakau)	1.5	1.5	1.5	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase peningkatan produktivitas peternakan	1.2 (sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, itik, babi)	1.02	1.07	1.07	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Urusan/Kinerja Urusan	Indikator	Target Nasional	Barito Kuala			Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Capaian 2020	Target 2021	Target 2022	
21.2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	80.5	100	65	75	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	TP=95, Horti= 90-95, Bun=80	TPH=68,70,90 TP dan Horti= 98%, Bun=80	TP dan Horti= 98%, Bun=80	TP dan Horti= 98%, Bun=80	Dinas pertanian TPH

Indikator makro pembangunan yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), rasio Gini, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia, merupakan indikator general yang dipergunakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia. Sedangkan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, adalah indikator spesifik yang dipergunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja jangka menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Disamping kedua kelompok indikator di atas, terdapat kelompok indikator berdasarkan urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Indikator dan target kinerja tersebut telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikator nasional dan provinsi pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Perangkat Daerah pengampu perencanaan pembangunan yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Indikator dan target kinerja lainnya yang belum termasuk pada target kinerja daerah hasil sinkronisasi dan harmonisasi di atas, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan melekat pada indikator dan target kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala baik berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, indkator program (outcome), indikator kegiatan (output) bahkan indikator sub kegiatan pada Renstra atau Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk melaksanakan Suistainable Development Goals (SDGs) secara optimal, melalui pencapaian 17 SDGs yang sebagian besar merupakan indikator pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Secara lebih detail pelaksanaan SDGs di Kabupaten Barito Kuala dapat dilhat pada lampiran dokumen RKPD ini.

VII. PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, merupakan momen perencanaan pembangunan yang sangat penting bagi pembangunan Barito Kuala, karena merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 sekaligus merupakan tahun penyempurnaan kinerja jangka menengah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 adalah dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022, yang diawali dengan penyusunan KUA-PPAS tahun 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, maka RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah yang memuat program/kegiatan pembangunan tahun 2022 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022. Selain itu hendaknya juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud dari peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), maka seluruh Kepala Perangkat Daerah bersama aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala harus bekerjasama dengan melakukan kolaborasi intensif dan memberikan perhatian yang serius dalam melaksanakan RKPD ini. Selain itu secara administratif penyusunan berbagai dokumen pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang meliputi : LKIP, LPPD, serta mempertahankan dan memperluas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) perlu mendapat perhatian yang serius.

Disamping beberapa hal tersebut, sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahunn 2022 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, yakni "**Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)**".



LAMPIRAN - LAMPIRAN